



2021 *Sangat Setuju*
BPHN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI



2020

LAPORAN KINERJA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, dan pembudayaan hukum berupa upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan melaksanakan misi Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional dan Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus laporan kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2020. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN tersebut, laporan kinerja menjabarkan 1 (satu) sasaran strategis yang menjadi target kinerja BPHN, yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat” dengan dengan Indikator kinerja utamanya adalah jumlah desa sadar hukum yang terbentuk dan 2 Sasaran Program yaitu Terwujudnya Pembinaan Hukum dan Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.



Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN tahun berikutnya.

Jakarta, 25 Februari 2021

Kepala BPHN,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Tugas dan Fungsi	3
B. Struktur Organisasi	4
1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional	5
2. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.....	5
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	6
4. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	6
5. Sekretariat Badan	7
C. Dukungan Sumber Daya Manusia	7
D. Permasalahan Organisasi	9
E. Sistematika Pelaporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi, Misi, Dan Ruang Lingkup Kerja	12
B. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2020	13
1. Sasaran Strategis.....	13
2. Sasaran Program.....	14
3. Sasaran Kegiatan.....	15
C. Prioritas Nasional Tahun 2020	17
D. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020	17
E. Pengukuran Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23



A.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020	23
1.	Sasaran Program (SP) 01: Terwujudnya Pembinaan Hukum	24
1.1.	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional.....	26
1.2.	Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional ...	28
1.3.	Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	29
2.	Sasaran Program (SP) 02: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	30
2.1.	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah....	31
2.2.	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	33
3.	Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan.....	34
3.1.	Sasaran Kegiatan 1	34
3.2.	Sasaran Kegiatan 2	39
3.3.	Sasaran Kegiatan 3	47
3.4.	Sasaran Kegiatan 4	50
B.	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	51
C.	CAPAIAN KINERJA LAINNYA PADA TAHUN 2020	55
	BAB IV PENUTUP	56
	LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Program 1 Terwujudnya Pembinaan Hukum	14
Tabel 2. Sasaran Program 2 Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.....	15
Tabel 3 Sasaran Kegiatan 1	15
Tabel 4 Sasaran Kegiatan 2.....	16
Tabel 5 Sasaran Kegiatan 3.....	16
Tabel 6 Sasaran Kegiatan 4.....	16
Tabel 7 Proyek BPHN yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020.....	17
Tabel 8 RKA BPHN.....	18
Tabel 9 RKA Pusat Perencanaan Hukum Nasional	18
Tabel 10 RKA Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	19
Tabel 11 RKA Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	19
Tabel 12 RKA Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.....	19
Tabel 13 RKA Sekretariat.....	20
Tabel 14 Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	21
Tabel 15 Pagu BPHN Tahun 2020 sebelum dan sesudah revisi.....	22
Tabel 16 Capaian Kinerja Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	24
Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2019 dan 2020	24
Tabel 18 Sasaran terwujudnya pembinaan hukum berdasarkan capaian 3 indikator	25
Tabel 19 Komposisi PUU objek analisis dan evaluasi Pokja.....	28
Tabel 20 Capaian kinerja pada sasaran terwujudnya kesadaran hukum masyarakat	31
Tabel 21 Sasaran Kegiatan 1	35
Tabel 22 Realisasi dan capaian Sasaran Kegiatan 1	36
Tabel 23 Sasaran Kegiatan 2.....	39



Tabel 24 Data Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2020	41
Tabel 25 Tabel Kinerja PBH Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020.....	45
Tabel 26 Indeks OBH.....	46
Tabel 27 Sasaran Kegiatan 3.....	47
Tabel 28 Sasaran Kegiatan 4.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan organisasi BPHN.....	5
Gambar 2 Diagram Dukungan SDM BPHN.....	8
Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 4 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan.....	9
Gambar 5 Diagram Presentase Anggaran BPHN	20
Gambar 6 Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2017-2020	26
Gambar 7 Grafik Data capaian Anggota JDIH Terintegrasi Tahun 2017-2020	30
Gambar 8 Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk Tahun 2017-2020	32
Gambar 9 Data Capaian Penerima Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2017-2020	34
Gambar 10 Data Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi Tahun 2017-2020	34
Gambar 11 Realisasi Target Kinerja I.K.1	37
Gambar 12 Data capaian penyusunan Naskah Akademik RUU Tahun 2017-2020 .	38
Gambar 13 Data Capaian Penyelarasan Naskah Akademik RUU periode Tahun 2016-2020	38
Gambar 14 Data Realisasi DSH yang terbentuk di Seluruh Wilayah Tahun 2017-2020	40
Gambar 15 Indikator Kinerja : Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk Tahun 2017-2020.....	43

Gambar 16 Indikator Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan	43
Gambar 17 Indikator Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	44
Gambar 18 Indikator Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum.....	46
Gambar 19 Jumlah Anggota Jaringan Hukum yang Terintegrasi dalam Sistem Jaringan Informasi.....	49
Gambar 20 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2017-2020.....	50
Gambar 21 Anggaran dan Realisasi BPHN Tahun 2017-2020	52
Gambar 22 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Program Tahun 2020	52
Gambar 23 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2020.....	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015-2019, capaiannya diukur melalui indikator kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019.

Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 103.707.365.689,- (97,33%) dari total pagu anggaran Rp 106.552.521.000,- termasuk anggaran pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah. Anggaran tersebut dikelola untuk pencapaian kinerja output dan outcome Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan menetapkan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2020 yakni, (1) Terwujudnya Pembinaan Hukum dan (2) Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.

Untuk mengukur sasaran program dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Indikator jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional menghasilkan capaian 100% atau 12 dokumen hasil rekomendasi dari target 12 hasil rekomendasi
2. Indikator jumlah RUU dalam prolegnas pemerintah, program penyusunan pp, dan program penyusunan perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan hukum nasional menghasilkan capaian 70% atau 14 RUU dari target 20 RUU



3. Indikator jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi menghasilkan capaian 1.020% Atau 255 anggota jaringan dari target 25 anggota jaringan
4. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah menghasilkan capaian 65,7% atau 115 Desa Sadar Hukum yang terbentuk dari target 175 Desa Sadar Hukum yang terbentuk
5. Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum menghasilkan capaian 222,8% Atau 12.698 Orang dari target 5.699 Orang untuk Bantuan Hukum Litigasi dan menghasilkan capaian 531,79% atau 4.031 kegiatan dari target 758 kegiatan untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Dalam mencapai realisasi Target kinerja dan anggaran yang berkualitas Badan Pembinaan Hukum Nasional memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat unit Eselon I sebesar 97,56 dan tingkat unit selaku satuan kerja (SATKER) 99,40 dan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020. Penyerapan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional yang optimal digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan hukum dalam rangka pencapaian Sasaran Program dan IKU.



BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Tujuan Reformasi Birokrasi dalam lima tahun ke depan diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan dynamic governance. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance yang salah satu asasnya adalah akuntabilitas. **Asas Akuntabilitas** menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah **asas** yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain untuk memenuhi asas akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, saat ini kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (unit) Teknis yang kedepannya kerangka kelembagaannya harus dapat memperkuat dan mendukung peningkatan kualitas organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Adapun susunan organisasi BPHN seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Susunan organisasi BPHN

1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Memiliki tugas melaksanakan perencanaan hukum nasional dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- d. fasilitasi perencanaan legislasi daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan naskah akademik;
- f. pelaksanaan penyelarasan naskah akademik;
- g. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Perencanaan Hukum Nasional; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

2. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Memiliki tugas melaksanakan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional dan menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis, program dan anggaran dokumentasi dan jaringan informasi hukum;

- b. koordinasi dan kerja sama dokumentasi dan Jaringan Informasi hukum;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. penyiapan naskah penerbitan dan publikasi hukum;
- f. pelaksanaan pelayanan, pelestarian dokumen hukum, penyebarluasan dan penemuan kembali informasi hukum;
- g. perencanaan program dan anggaran pusat;
- h. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan bantuan hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum;
- e. fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;
- f. penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum;
- g. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

4. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum serta pemantapan konsepsi pembangunan hukum;



- c. penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- e. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan hukum dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- f. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

5. Sekretariat Badan

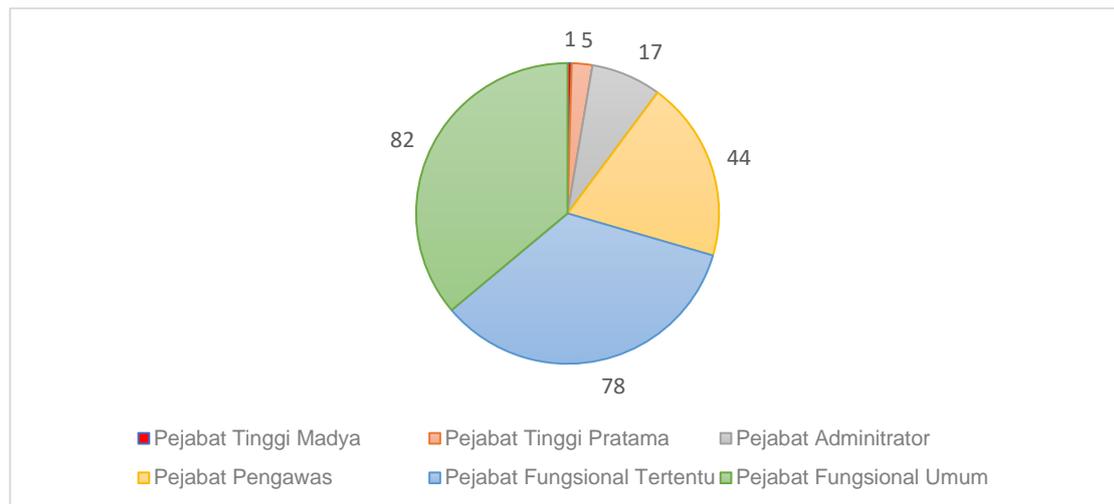
Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran; dan
- f. pengelolaan hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga badan.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

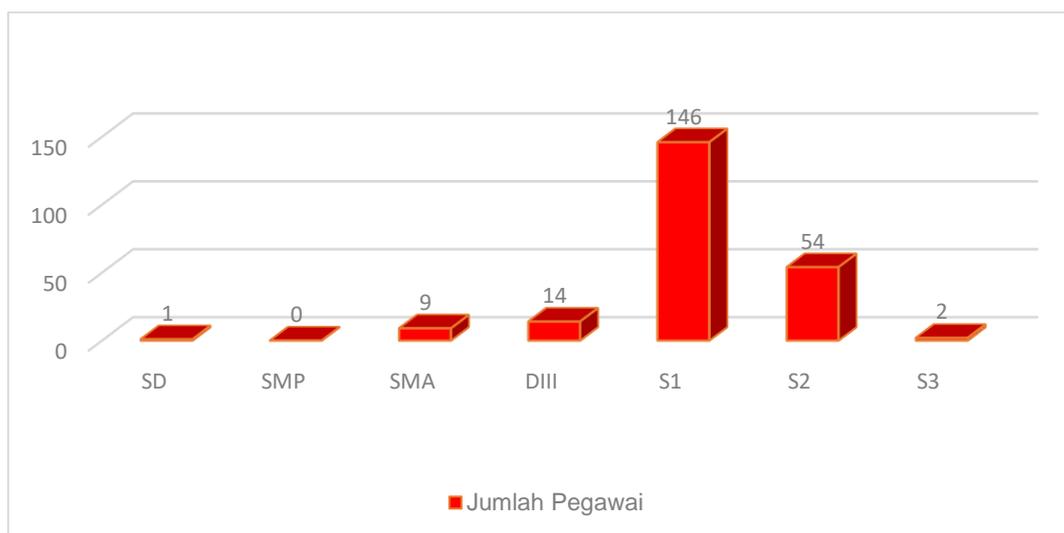
Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2 dan S3 yang berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) dengan komposisi 121 laki-laki dan 109 perempuan. Pegawai yang pensiun pada tahun 2020 berjumlah 5 orang, mutasi karena pindah tugas (JFU) 1 orang dan mutasi karena promosi 1 orang (pejabat administrator), sehingga jumlah pegawai pada akhir desember 2020 adalah 226 dengan komposisi 121 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 106 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum dengan formasi sebagai berikut:





Gambar 2 Diagram Dukungan SDM BPHN

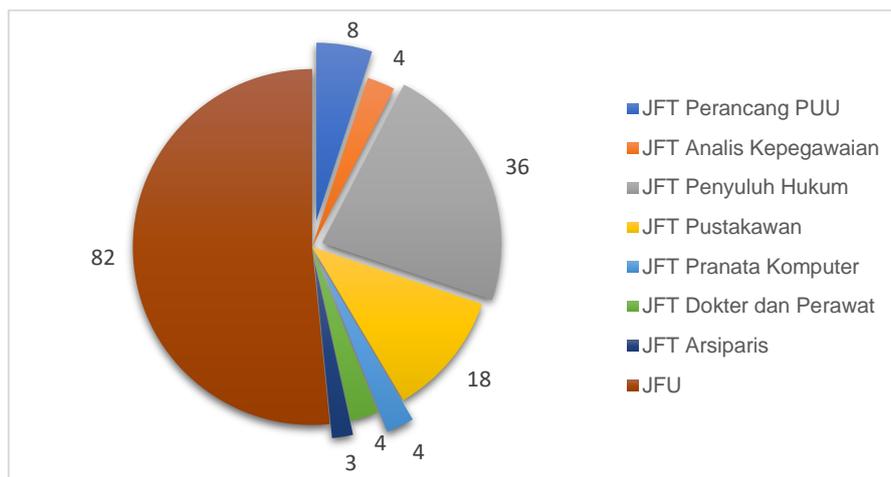
Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Badan Pembinaan Hukum Nasional sangatlah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) berjumlah 146 orang atau sebesar 64% artinya lebih dari 50% pegawai BPHN ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian pada posisi kedua ada 54 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 23% dari total pegawai.

Potensi sumber daya manusia berdasarkan jabatan yang diampu dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai selain pejabat struktural adalah 160 orang dengan skema yang menduduki jabatan fungsional tertentu hampir sebanding dengan pegawai yang mengampu jabatan fungsional umum (pelaksana). Jumlah JFT di BPHN adalah 78 orang atau 48,75% sedangkan pegawai dalam jabatan fungsional umum (pelaksana) berjumlah 82 orang atau 51.25%. Selain itu jabatan fungsional tertentu di BPHN bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPHN. JFT penyuluh hukum misalnya sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat. JFT perancang yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan hukum. Mulai dari penyusunan naskah akademik, penyelarasan naskah akademik dan perencanaan legislasi dan juga dilibatkan dalam proses perancangan rancangan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN. Selain itu perancang juga dilibatkan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung terwujudnya deregulasi peraturan perundang-undangan. Selain itu ada juga JFT Pustakawan yang mendukung pelayanan informasi hukum baik online maupun offline. Sedangkan JFT Pranta Komputer mendukung terlaksananya inovasi menuju era pelayanan digital.

D. Permasalahan Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum dimanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan oleh K/L sebagai bahan penyusunan perencanaan hukum;

2. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional yang dihasilkan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh BAPPENAS sebagai bahan RPJMN;
3. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum tertata dengan baik;
4. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam masa pandemi covid-19;
5. Capaian Prolegnas, Progsun PP/Perpres, tidak sesuai dengan perencanaan;
6. Naskah akademik yang dihasilkan belum secara komprehensif menjawab kebutuhan penyusunan penormaan;
7. belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan yang efektif dan efisien;
8. Keterlambatan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan;
9. Output pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak terpenuhi secara tepat waktu;
10. Terdapat dokumen arsip yang tidak bisa ditelusuri/ hilang karena belum maksimal dalam metode pengarsipan;
11. Terdapat aset Barang Milik Negara (BMN) yang hilang sehingga pengamanan aset tidak dilakukan secara optimal;

E. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan Permasalahan Organisasi.

2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Perjanjian Kinerja tahun 2020 serta rencana kerja dan anggaran dan uraian mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Akuntabilitas Kinerja

1) Realisasi kinerja BPHN

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja BPHN berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis kementerian.

2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3) Capaian Kinerja lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perumusan Kebijakan teknis untuk menunjang penyelenggaraan bantuan hukum (2) Capaian menjadi Unit Kerja Pelayanan Wilayah Bebas dari Korupsi.

4. Penutup

Pada BAB ini disampaikan simpulan atas pencapaian kinerja BPHN pada tahun 2020 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Dan Ruang Lingkup Kerja

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unit kerja Eselon I di bawah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengemban visi dan misi yang sama dengan yang diamanatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum yang berkualitas”. Alur visi, misi dan ruang lingkup kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini :



B. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2020

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengampu 1 (satu) sasaran strategis dan 1 Program Kegiatan dengan 2 (dua) sasaran program yakni (1) Terwujudnya Pembinaan Hukum Nasional; (2) Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat yang masing-masing memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu dari sasaran program kemudian diturunkan menjadi beberapa sasaran kegiatan yang lebih mengarahkan pada operasional pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut uraiannya :

1. Sasaran Strategis

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat” yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Indikator Kinerja Utamanya adalah jumlah desa sadar hukum yang terbentuk dengan target 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

SASARAN STRATEGIS BPHN

Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat,
Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

IKU

Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk

TARGET

175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum

2. Sasaran Program

Sasaran program BPHN berdasarkan perjanjian kinerja terdiri atas :

a. Sasaran Program 1, Terwujudnya Pembinaan Hukum

Sasaran ini terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, (2) Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, (3) Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.

Tabel 1. Sasaran Program 1 Terwujudnya Pembinaan Hukum

INDIKATOR	TARGET
Indikator Kinerja Utama 1.1. Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi
Indikator Kinerja Utama 1.2. Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU
Indikator Kinerja Utama 1.3. Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 Anggota Jaringan

b. Sasaran Program 2, Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sasaran program ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah, (2) Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum.

Tabel 2. Sasaran Program 2 Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

INDIKATOR	TARGET
Indikator Kinerja Utama 2.1. Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Indikator Kinerja Utama 2.2. Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.457 orang

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan BPHN terdiri atas 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dengan dengan uraian sebagai berikut :

a. Sasaran Kegiatan 1

Tersusunnya Dokumen Prioritas Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres, serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Penyusunan RUU.

Tabel 3 Sasaran Kegiatan 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda	3 DOKUMEN
2	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Disusun	2 NASKAH AKADEMIK
3	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan	15 NA RUU
4	Jumlah Naskah Akademik RUU Badan Usaha Yang Disusun	1 NASKAH AKADEMIK

b. Sasaran Kegiatan 2

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Tabel 4 Sasaran Kegiatan 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk di Setiap Wilayah	175 DSH
2	Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan	150 Kegiatan
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33 Kanwil
4	Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum	50 Penyuluh

c. Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum dengan Tersediannya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN

Tabel 5 Sasaran Kegiatan 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang Terintegrasi Secara Online Dalam Sistem Jaringan Informasi	25 Anggota
2	Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	100 Dokumen

d. Sasaran Kegiatan 4

Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Hukum.

Tabel 6 Sasaran Kegiatan 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	12 Rekomendasi
2	Tersusunnya Dokumen SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1 Dokumen

C. Prioritas Nasional Tahun 2020

Dalam RKP 2020, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM adalah Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan serta Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Prioritas Nasional ini kemudian dibagi ke dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas BPHN adalah sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL: STABILITAS PERTAHANAN DAN KEMAMAN

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRORITAS	PROYEK PRIORITAS	OUTPUT PRIORITAS
Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Penataan Regulasi (Terwujudnya Regulasi yang Berkualitas)	Pembaruan Substansi Hukum	1. Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Penyusunan NA RUU Badan Usaha
Perbaikan Pidana Pendekatan Restoratif (Meningkatnya Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)	Penguatan Regulasi yang Mendukung Keadilan Restoratif	Optimalisasi Upaya Pemulihan Korban dan Masyarakat serta Pembinaan Pelaku Tindak Pidana	1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi 2. Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Tabel 7 Proyek BPHN yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020

D. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran

terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA.

Dari serangkaian proses penyusunan tersebut kemudian dihasilkan RKA BPHN yakni:

Tabel 8 RKA BPHN

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.749.425.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.289.900.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.895.500.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.702.509.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 34.083.837.000,-
JUMLAH		Rp. 42.721.171.000,-

Rencana kerja dan anggaran ini kemudian diturunkan ke level kegiatan di tiap-tiap unit eselon II dengan rincian:

Tabel 9 RKA Pusat Perencanaan Hukum Nasional

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Dokumen Program Legislasi	Rp. 680.568.000,-
2.	Naskah Akademik RUU	Rp. 391.941.000,-
3.	Penyelarasan Naskah Akademik	Rp. 480.000.000,-
4.	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	Rp. 150.000.000,-
JUMLAH		Rp. 1.702.509.000,-

Tabel 10 RKA Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Desa Sadar Hukum	Rp. 1.153.893.000,-
2.	Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 237.195.000,-
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	Rp. 754.185.000,-
4.	Penyuluh Hukum Nasional	Rp. 750.227.000,-
JUMLAH		Rp. 2.895.500.000,-

Tabel 11 RKA Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Sasaran Anggota JDIHN	Rp. 1.203.315.000,-
2.	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online	Rp. 546.110.000,-
JUMLAH		Rp. 1.749.425.000,-

Tabel 12 RKA Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

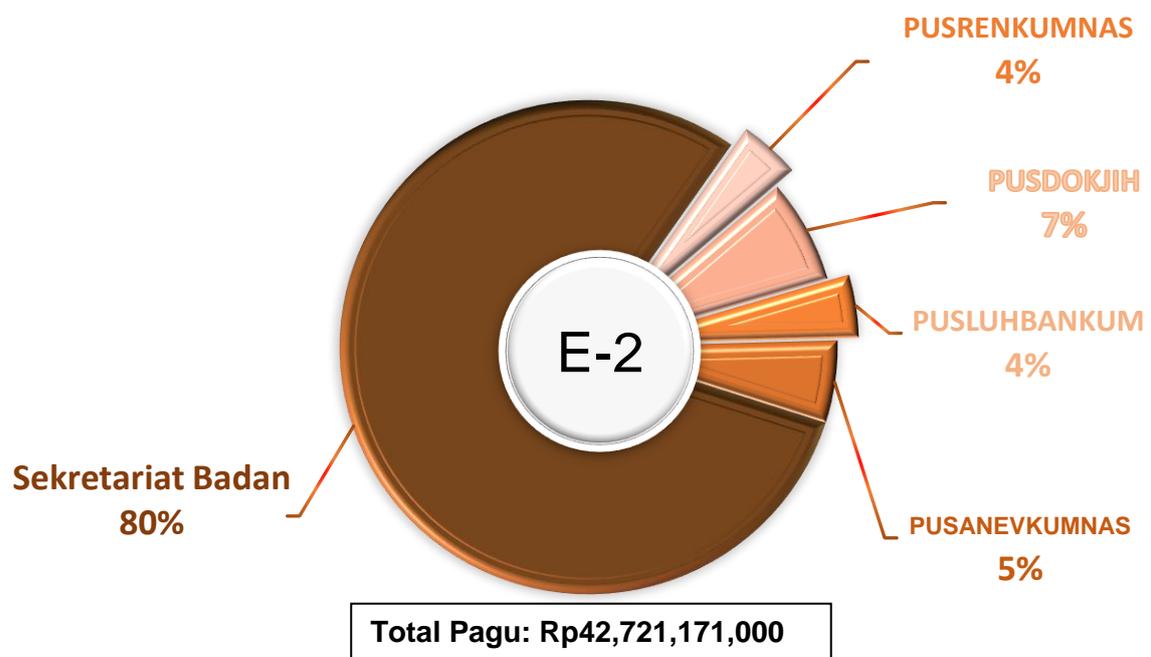
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 1.718.390.000,-
2.	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 121.510.000,-
3.	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 450.000.000,-
JUMLAH		Rp. 2.289.900.000,-



Tabel 13 RKA Sekretariat

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp. 2.940.590.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 6.387.000.000,-
3.	Layanan Perkantoran	Rp. 24.756.247.000,-
JUMLAH		Rp. 34.083.837.000,-

Dengan demikian dapat digambarkan alokasi anggaran per unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Diagram Presentase Anggaran BPHN

Alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat BPHN yaitu sebesar Rp34,083.837,000 atau 80% dengan anggaran terbesar belanja pegawai. Dibandingkan tahun 2019 anggaran BPHN pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5,767,397,000. Dan untuk tahun 2021 BPHN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp49,454,433 atau mengalami penambahan sebesar Rp6,733,271,000. Berikut perbandingan Pagu tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 14 Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2020

PROGRAM	ANGGARAN (2019)	ANGGARAN (2020)	NAIK/TURUN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Rp10,905,000,000	Rp8,637,334,000	↓ Rp2,267,666,000
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Rp26,048,774,000	Rp34,083,837,000	↑ Rp8,035,063,000

Terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, BPHN melakukan beberapa kali revisi dalam rangka refocusing anggaran untuk program penanganan covid-19. Pagu awal sebesar Rp. 42,721,171,000,- kemudian setelah direfocusing menjadi sebesar Rp. 39,634,524,000.

Anggaran ini belum termasuk anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum di wilayah yang dilaksanakan oleh 33 Kantor Wilayah. Dengan anggaran sebesar Rp66.917.997.000 pada tahun 2020 maka total Pagu BPHN adalah Rp109.639.168.000 dan setelah direvisi total Pagu BPHN menjadi RP106,552,521,000 dengan rincian:

-  **ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN HUKUMNASIONAL 2020 (AWAL DIPA) : RP 109.639.168.000**
-  **ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN HUKUMNASIONAL (PASCA REVISI PENANGANAN COVID) : RP 106.552.521.000**

Tabel 15 Pagu BPHN Tahun 2020 sebelum dan sesudah revisi

NO	UNIT KERJA	PAGU 2019	PAGU 2020 (AWAL)	PAGU 2020 (REVISI)
1	Satker BPHN	Rp38,585,018,000	Rp42,721,171,000	Rp39.634.524.000
2	Satker Kantor Wilayah (33 Kanwil)	Rp66,072,828,000	Rp66,917,997,000	Rp66,917,997,000
	Jumlah	Rp 104.657.846.000	Rp109,639,168,000	Rp106,552,521,000

E. Pengukuran Kinerja

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran BPHN, secara periodik seluruh dilakukan monitoring melalui penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, maupun laporan capaian kinerja pertriwulan. Dari data dan laporan yang telah disampaikan dilakukan rapat evaluasi kinerja yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II dan Eselon III. Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi di antaranya:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja
3. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran
4. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Kinerja BPHN tahun 2020 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran program. Mengingat Renstra Kementerian Hukum dan HAM untuk periode 2020-2024 belum ditetapkan, maka IKU Program Pembinaan Hukum Nasional masih mengacu pada IKU Tahun 2019. Adapun capaian kinerja utama BPHN tahun 2020 yang diuraikan berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN HUKUM YANG MUDAH, CEPAT, DAN MENJANGKAU SELURUH LAPISAN MASYARAKAT
--------------------------	---

Pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dalam proses pembentukannya, dimulai dari pembentukan kelompok-kelompok sadar hukum yang berada di desa/kelurahan binaan dan kemudian berjenjang sampai dengan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Saat ini, pembentukan desa/kelurahan didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi beberapa kriteria penilaian yang meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Pada tahun 2020, dari target 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk, realisasinya adalah 115 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat, ini berarti target tersebut tidak terpenuhi dengan capaian hanya 65,71%.



Tabel 16 Capaian Kinerja Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang Mudah, Cepat, dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di seluruh wilayah	175	115	65,71%

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun 2019 sebanyak 310 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di 8 (delapan) wilayah atau sebesar 177,14%, maka terjadi penurunan sebesar 109,43%. Angka ini cukup signifikan terhadap efisiensi kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penurunan capaian pada tahun 2020 ini lebih disebabkan faktor eksternal. Kondisi penyebaran covid-19 menyebabkan pemerintah daerah lebih fokus untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pengendalian penyebaran covid-19.

Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2019 dan 2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
2019	175	310	177,14%
2020	175	115	65,71%

Formulasi penghitungan capaian: $Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$

1. Sasaran Program (SP) 01: Terwujudnya Pembinaan Hukum

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah dan meniadakan pertentangan dengan antara peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal maupun horisontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil. Selaras dengan tujuan negara yang hendak dicapai secara bertahap, maka dalam muatan yang terkandung harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di masyarakat.

Untuk mewujudkan kepastian hukum serta mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik dibutuhkan langkah-langkah luar biasa (extraordinary action) berupa revitalisasi hukum agar menjadikan hukum nasional sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan kepastian hukum. Untuk

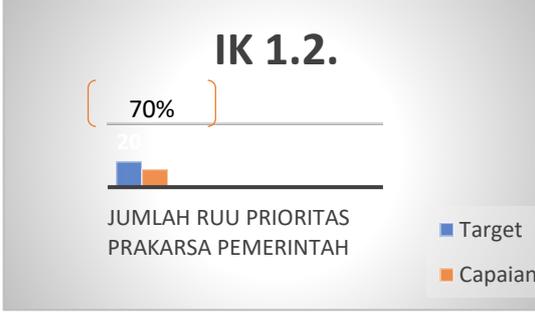


mewujudkan hal ini, perlu adanya (1) optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional; (2) peningkatan kualitas naskah akademik; (3) peningkatan peran perencanaan legislasi nasional; (4) optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi hukum melalui pengintegrasian sebanyak mungkin anggota JDIH untuk memperluas pemberian layanan informasi hukum.

Sasaran terwujudnya pembinaan hukum telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 3 indikator dengan menggunakan rumus perhitungan

$$\text{Formulasi pengitungan capaian:} \quad \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Tabel 18 Sasaran terwujudnya pembinaan hukum berdasarkan capaian 3 indikator

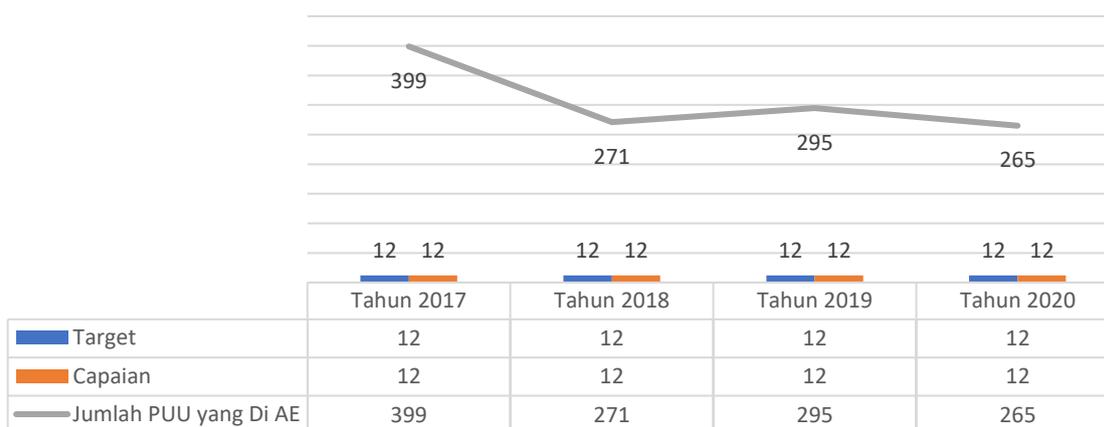
INDIKATOR	CAPAIAN
<p>1.1. Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional</p>	<p style="text-align: center;">IK 1.1.</p>  <p style="text-align: center;">REKOMENDASI HASIL AE</p> <p style="text-align: center;">■ Target ■ Capaian</p>
<p>1.2. Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional</p>	<p style="text-align: center;">IK 1.2.</p>  <p style="text-align: center;">JUMLAH RUU PRIORITAS PRAKARSA PEMERINTAH</p> <p style="text-align: center;">■ Target ■ Capaian</p>
<p>1.3. Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi</p>	<p style="text-align: center;">IK 1.3.</p>  <p style="text-align: center;">ANGGOTA JDIH TERINTEGRASI</p> <p style="text-align: center;">■ Target ■ Capaian</p>

1.1. Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional

Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (legal norm control mechanism). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “judicial review” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “legislative control” atau “legislative review”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “administrative control” atau “executive review”.

Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (existing), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat dan diharapkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia lebih berkualitas.

Pada tahun 2020 Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menghasilkan 12 Rekomendasi yang telah disusun dalam sebuah Dokumen Perencanaan Hukum Nasional (DPHN). 12 rekomendasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan 265 PUU yang dianalisis dan evaluasi. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat setiap tahunnya capaian target ini selalu tercapai sehingga rata-rata capaian dari target tersebut adalah 100%.



Gambar 6 Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2017-2020

Apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tahun 2017, 2018 dan 2019, maka jumlah 12 (dua belas) rekomendasi dalam lingkup kelompok kerja tetap sama. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-

undangan yang dianalisis dan dievaluasi, maka tahun 2020 terdapat penurunan 35 (tiga puluh lima) dari 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) peraturan perundang-undangan pada tahun 2019, 11 (sebelas) dari 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 dan 139 dari 399 Peraturan perundang-undangan yang dianalisis pada tahun 2017. Penurunan jumlah peraturan perundang-undangan yang dianalisis tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capain kinerja karena banyak sedikitnya peraturan tersebut tergantung cakupan pengaturan pada topik yang dibahas.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2020 dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) fokus/tema sesuai dengan Prioritas Prolegnas dan RKP sebagai berikut:

- 1) Keimigrasian
- 2) Pemilihan Umum
- 3) Akses Pelayanan Bantuan Hukum
- 4) Kepariwisata
- 5) Pembiayaan Infrastruktur
- 6) Perlindungan dari Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 7) Mitigasi Pencemaran Lingkungan
- 8) Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan
- 9) Tata Kelola Perkebunan
- 10) Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 11) Kependudukan
- 12) Penyiaran

Kegiatan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan dalam 12 kelompok kerja, dimana masing-masing Pokja melakukan beberapa tahapan yaitu melaksanakan rapat pokja, rapat pokja dengan narasumber, Focus Group Discussion (FGD) di Daerah dan di Jakarta dengan peserta K/L terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

Untuk lebih mempermudah cara kerja dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan maka di ciptakan sebuah Sistem Digitalisasi dan Database Analsis dan Evaluasi Hukum bersama dengan Pusdatin Kemenkumham yang dinamakan dengan Aplikasi “E-VADATA”, melalui aplikasi ini diharapkan akan terbangun sistem informasi dan monev hasil analisis dan evaluasi hukum yang



terpadu dan terintegrasi. Berikut adalah komposisi peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi Pokja:

Tabel 19 Komposisi PUU objek analisis dan evaluasi Pokja

NO.	POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	UU	PP	PERPRES	PERMEN	LAIN2
1.	Akses Pelayanan Bantuan Hukum	13	7	1	3	1
2.	Pemilihan Umum	2	1	3	-	4
3.	Keimigrasian	5	1	3	11	-
4.	Kepariwisata	3	1	2	1	-
5.	Pembiayaan Infrastruktur	5	4	5	7	-
6.	Perlindungan dari Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	29	-	-	-	-
7.	Mitigasi Pencemaran Lingkungan	4	4	3	9	2
8.	Tata Kelola Perkebunan	12	4	2	10	3
9.	Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan	15	10	-	-	-
10.	Sistem Jaminan Sosial Nasional	5	10	5	12	-
11.	Kependudukan	3	3	6	9	-
12.	Penyiaran	3	8	-	7	-
	TOTAL	99	53	30	69	10

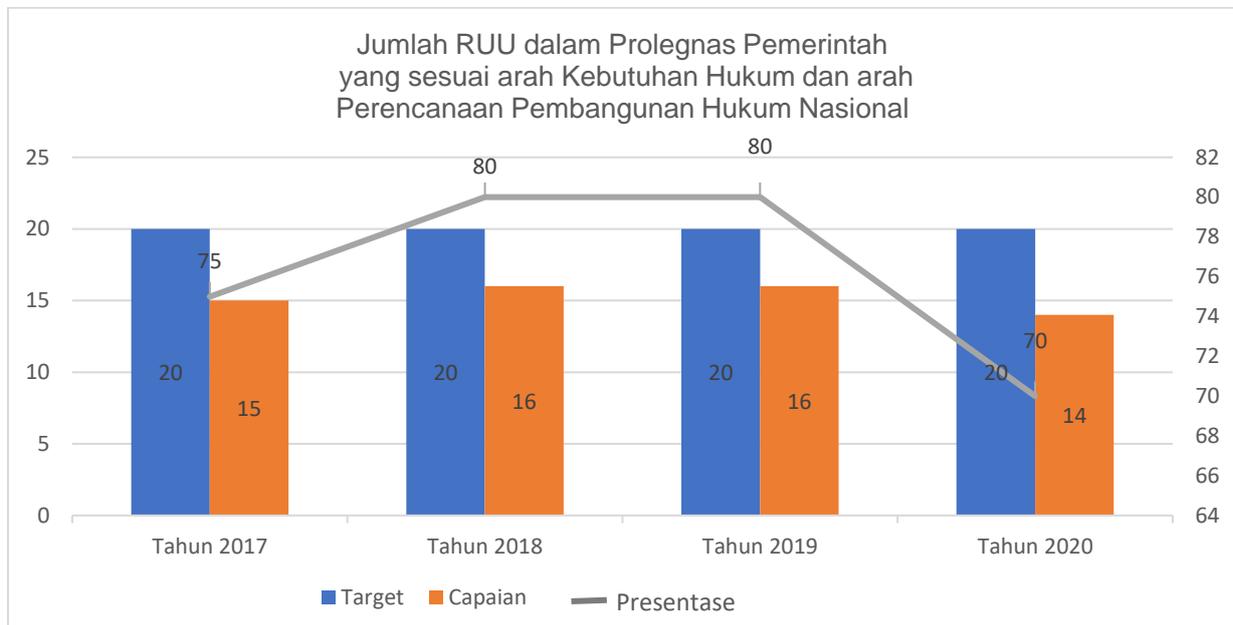
1.2. Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Program legislasi nasional (Prolegnas) merupakan sebuah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang terdiri dari prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan.

Berdasarkan target kinerja utama yang ditetapkan yakni jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional adalah 20 RUU, capaiannya adalah 14 RUU atau 70% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target yang sama capainnya adalah 16 RUU prakarsa pemerintah yang masuk dalam prioritas tahunan atau sebesar 80%. Ini menunjukkan pencapaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Begitupun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2017 dengan target 20 RUU capaiannya pada tahun 2020 adalah yang



paling rendah. Hal ini disebabkan faktor eksternal karena penetapan Prolegnas bergantung pada hasil penetapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna. Berikut data capaian dari tahun 2017 – 2020:

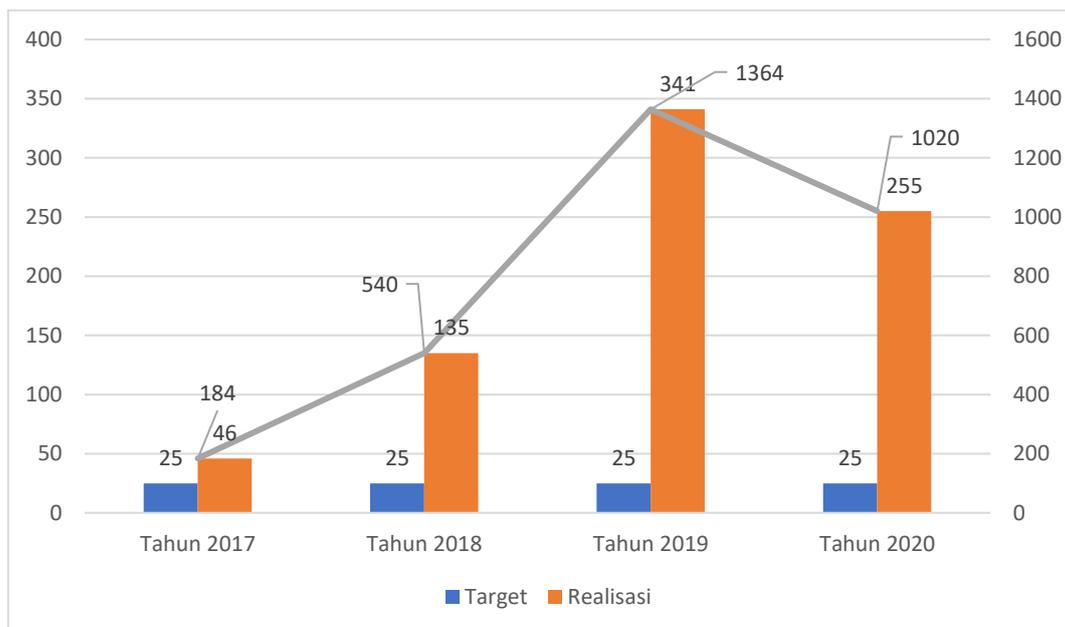


Formulasi pengitungan capaian:
$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

1.3. Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah anggota JDIH yang terintegrasi selalu melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dengan target 25 anggota, capaiannya adalah 255 anggota atau sebesar 1.020%.

Pada tahun 2017 jumlah anggota JDIH yang terintegrasi adalah 46 anggota dari target 25 anggota atau sebesar 184%, untuk tahun 2018 meningkat drastis sebanyak 135 anggota dari target 25 anggota atau sebesar 540% dan pada tahun 2019 mencapai hingga 341 anggota dari target 25 anggota atau sebesar 1.364%. Berikut data capaian tahun 2017-2020:



Gambar 7 Grafik Data capaian Anggota JDIH Terintegrasi Tahun 2017-2020

Formulasi pengitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

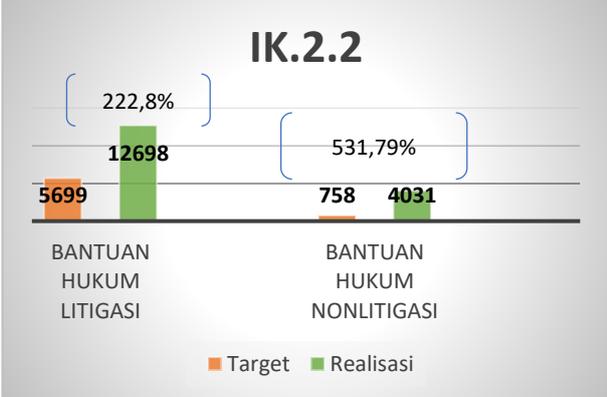
Peningkatan jumlah Anggota JDIH yang terintegrasi dan Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi dengan nilai yang cukup tinggi dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sangat signifikan karena dilakukannya integrasi ulang terhadap Anggota JDIH. Kemudian pada tahun 2020 ada penurunan disebabkan terbatasnya aktivitas anggota jaringan disebabkan kebijakan terhadap fokus kegiatan yang sebagian besar dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19. Namun demikian kegiatan dilakukan melalui metode daring yang tetap menjaga kinerja hingga target dapat dicapai bahkan dilampaui.

2. Sasaran Program (SP) 02: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Demikian pula dengan sasaran terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, pembinaan hukum telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 (dua) indikator yakni, jumlah DSH yang terbentuk dan jumlah penerima bantuan hukum. Untuk Indikator DSH yang terbentuk, pada tahun 2020 kegiatan peresmian DSH tidak dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilakukannya kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerumunan. Kegiatan ini kemudian dialihkan menjadi kegiatan evaluasi DSH/Kelurahan Sadar Hukum terhadap 98 Desa/Kelurahan di 5 Provinsi (Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan). Namun demikian dipenghujung tahun 2020, Provinsi Jawa Barat

mengusulkan 115 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang kemudian ditetapkan menjadi Desa/kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.02.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) tanggal 30 Desember 2020. Adapun capaian kinerja pada sasaran terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 20 Capaian kinerja pada sasaran terwujudnya kesadaran hukum masyarakat

INDIKATOR	CAPAIAN								
<p>2.1. Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah (DSH dievaluasi)</p>	 <p>IK 2.1.</p> <p>JUMLAH DSH YANG TERBENTUK (DIEVALUASI)</p> <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>Capaian</td> <td>115</td> </tr> </table> <p>65,7%</p>	Target	175	Capaian	115				
Target	175								
Capaian	115								
<p>2.2. Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum</p>	 <p>IK.2.2</p> <p>BANTUAN HUKUM LITIGASI</p> <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>5699</td> <td>Realisasi</td> <td>12698</td> </tr> </table> <p>222,8%</p> <p>BANTUAN HUKUM NONLITIGASI</p> <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>758</td> <td>Realisasi</td> <td>4031</td> </tr> </table> <p>531,79%</p>	Target	5699	Realisasi	12698	Target	758	Realisasi	4031
Target	5699	Realisasi	12698						
Target	758	Realisasi	4031						

Formulasi penghitungan capaian:

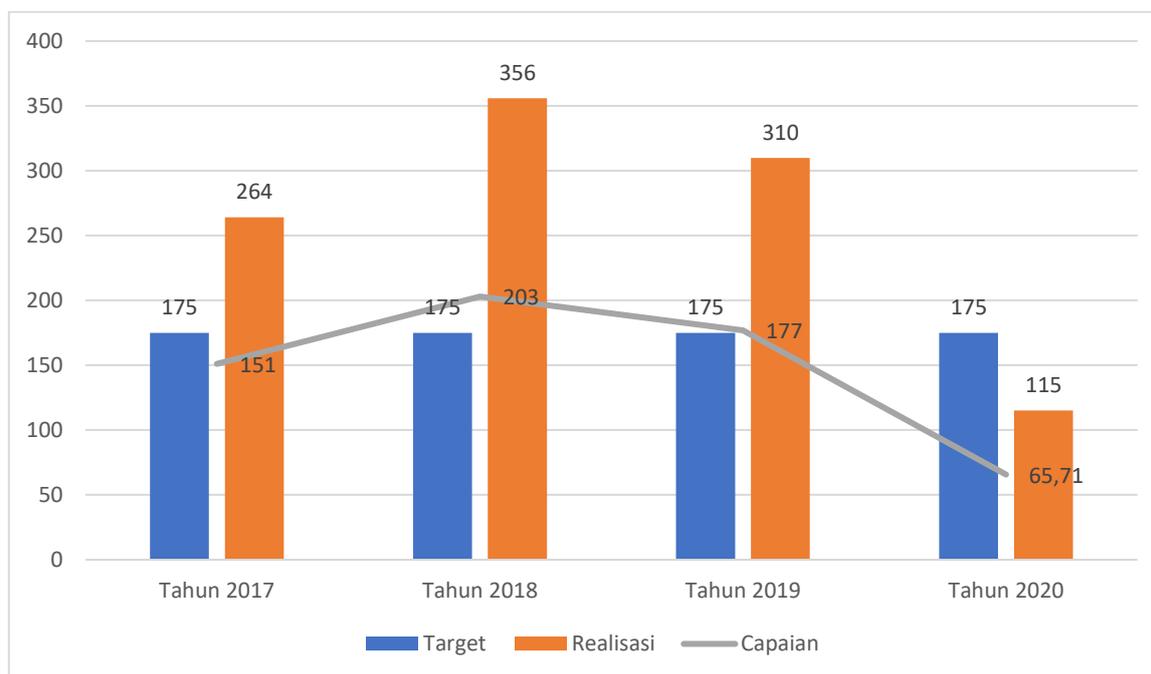
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2.1. Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah

Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat dan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen

masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diantaranya melalui penetapan/pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum merupakan langkah yang strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah yakni 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, untuk capaian tahun 2020 adalah 115 Desa/Kelurahan atau sebesar 65,71% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan pada masa pandemi covid-19, pemerintah daerah yang merupakan pengurus Desa/Kelurahan Sadar Hukum lebih fokus untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penyebaran covid-19 sehingga tidak melakukan kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya target tersebut selalu bisa dicapai bahkan dilampaui. Berikut data capaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di seluruh wilayah pada tahun 2017-2020:



Gambar 8 Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk Tahun 2017-2020

Formulasi pengitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

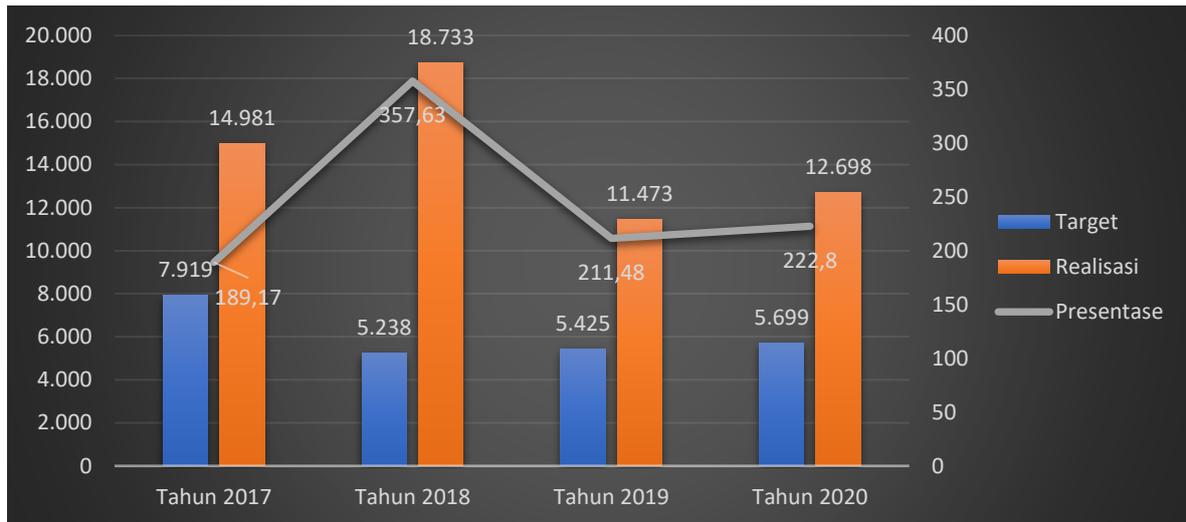
Meskipun kegiatan peresmian desa/kelurahan sadar hukum diadakan dan anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi

desa/kelurahan sadar hukum, namun tidak bukan berarti tidak ada pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Untuk Tahun 2020 pembentukan desa/kelurahan sadar hukum hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan mengusulkan 115 Desa/Kelurahan yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2.2. Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum

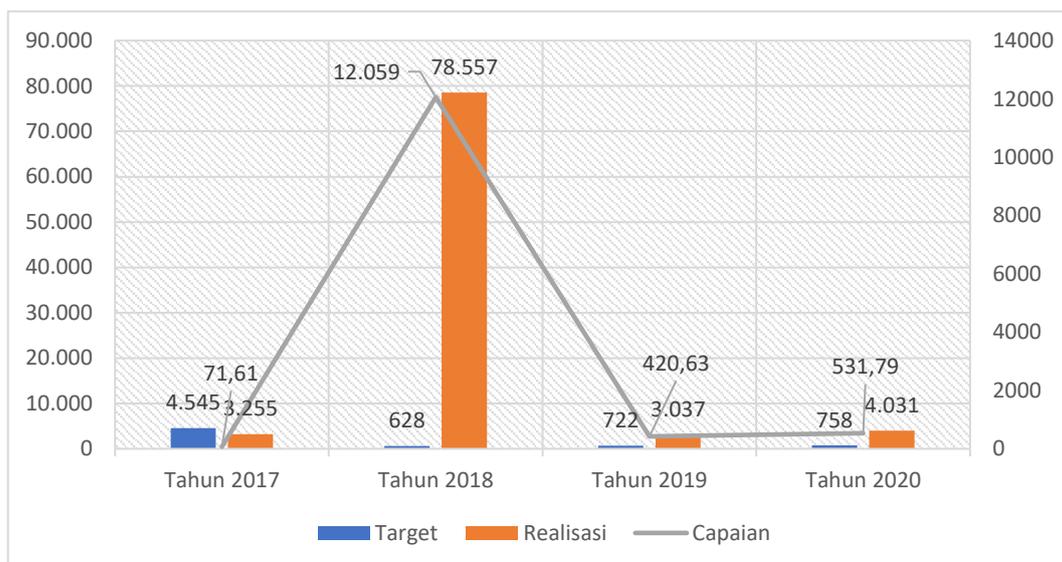
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM adalah penyelenggara pemberian bantuan hukum. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum, setiap tahunnya selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 6.457 Orang dengan pembagian 5.699 kegiatan bantuan hukum litigasi dan 758 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi. dari target 5.699 orang penerima bantuan hukum litigasi capaiannya adalah 12.698 orang atau sebesar 222,8% dan untuk kegiatan bantuan hukum litigasi dengan target 758 kegiatan capaiannya adalah 4.031 kegiatan atau sebesar 531,79%. Jika dibandingkan dengan capain target tahun 2019 dengan target 5.425 Orang penerima bantuan hukum litigasi adalah 11.473 Orang atau sebesar 211,44% dan target kegiatan bantuan hukum nonlitigasi adalah 722 kegiatan dengan capaian 3.037 kegiatan atau sebesar 420,63%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pencapaian pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Berikut perbandingan data jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum tahun 2017-2020:



Gambar 9 Data Capaian Penerima Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2017-2020

Formulasi penghitungan: $Presentase\ Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$



Gambar 10 Data Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi Tahun 2017-2020

Formulasi penghitungan capaian: $Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$

3. Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan

3.1. Sasaran Kegiatan 1

Tersusunnya Dokumen Prioritas Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres, serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Penyusunan RUU.

Tabel 21 Sasaran Kegiatan 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Disusun	2 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	150
3	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan	15 NA RUU	9 NA RUU	60
4	Jumlah Naskah Akademik RUU Badan Usaha Yang Disusun	1 Naskah Akademik	1 Naskah Akademik	100

Formulasi pengitungan capaian:
$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari sasaran kinerja ini, hampir seluruh target indikator kinerja dapat dicapai dan ada juga yang melebihi target yaitu penyusunan naskah akademik yang menargetkan 2 Naskah dan tercapai 3 Naskah atau 150%. Adapun judul Naskah Akademik yang disusun pada tahun 2020 adalah : (1) Naskah Akademik RUU jaminan Benda Bergerak; (2) Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional; (3) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Bantuan Timbalik Balik dalam Masalah Pidana antara Rusia dan Indonesia.

Kecuali untuk indikator kinerja jumlah naskah akademik yang diselaraskan, dari target 15 Naskah Akademik RUU hanya 9 Naskah Akademik yang diselaraskan atau 60% dari target, dengan rincian 7 naskah akademik dinyatakan selaras dan 2 naskah akademik dikembalikan untuk dibahas kembali di internal pemrakarsa terkait substansi yang masih belum terkonfirmasi.

Data rincian naskah akademik yang telah diselaraskan disajikan pada lampiran 3

Untuk dokumen Program penyusunan PP dan Perpres telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Namun karena beberapa Kementerian/LPNK masih melakukan perubahan/penambahan usulan Program sehingga baru bulan Januari 2021 Program Penyusunan PP dan Perpres benar-benar rampung 100%.



Jika dibandingkan dengan capaian periode tahun 2019, maka realisasi dan capaian atas sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 Realisasi dan capaian Sasaran Kegiatan 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Disusun	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	100	2 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	150
3	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan	20 NA RUU	10 NA RUU	50	15 NA RUU	9 NA RUU	60
4	Jumlah Naskah Akademik RUU Badan Usaha Yang Disusun	-	-	-	1 Naskah Akademik	1 Naskah Akademik	100

Jika dilihat pada tabel di atas indikator pertama Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda yang ditargetkan 3 dokumen tercapai baik pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020. Untuk indikator Naskah akademik yang disusun pada tahun 2019 capaiannya sesuai dengan target yaitu 3 Naskah akademik. Kemudian indikator naskah akademik yang disusun dari target 2 naskah capaiannya adalah 3 naskah atau 150%. Ini adalah capaian yang cukup signifikan mengingat kegiatan dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19. Hal ini bisa dicapai karena kegiatan penyusunan dilakukan secara intens terutama melalui rapat yang memanfaatkan media daring maupun pertemuan-pertemuan dengan anggota tim yang memiliki kompetensi terkait substansi naskah akademik yang disusun. Namun untuk indikator naskah akademik yang diselaraskan pada tahun 2019 maupun tahun 2020 tidak mencapai target. Hal



ini dipengaruhi oleh faktor eksternal karena sifat kegiatan penyelarasan naskah akademik sangat bergantung pada ada atau tidaknya permohonan yang diajukan dari Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan penyelarasan naskah akademik.

Pada tahun ini BPHN kegiatan penyusunan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha yang masuk sebagai program prioritas nasional selesai dilaksanakan, ini berarti target telah terpenuhi.

Berikut disajikan rincian data realisasi per Indikator Kinerja dari SK.1 “Tersusunnya Dokumen Prioritas Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres, serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Penyusunan RUU” tahun 2017-2020:

IK1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda

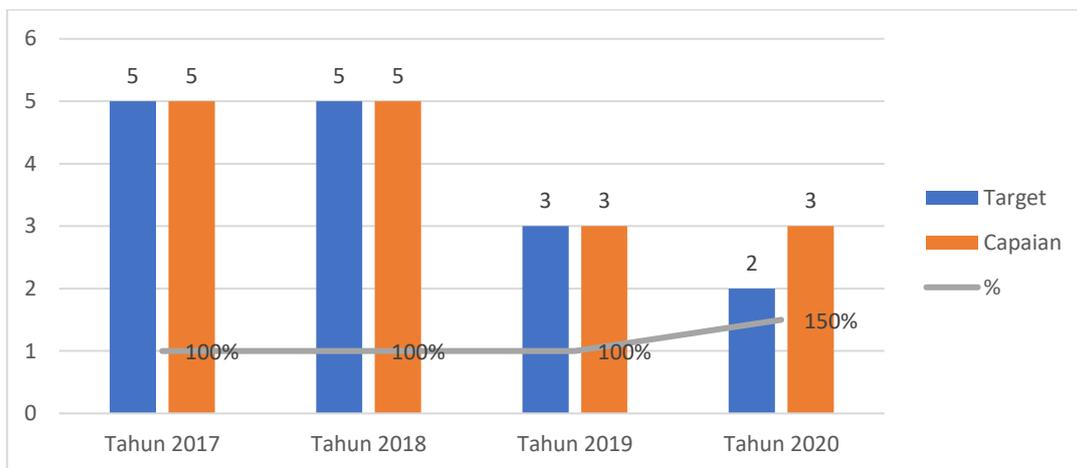


Gambar 11 Capaian Kinerja I.K.1

Formulasi penghitungan capaian:
$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

Dari grafik di atas nampak bahwa capaian terhadap target yang ditetapkan sebanyak 3 dokumen selalu tercapai untuk setiap tahunnya.

IK2: Jumlah Naskah Akademik yang Disusun

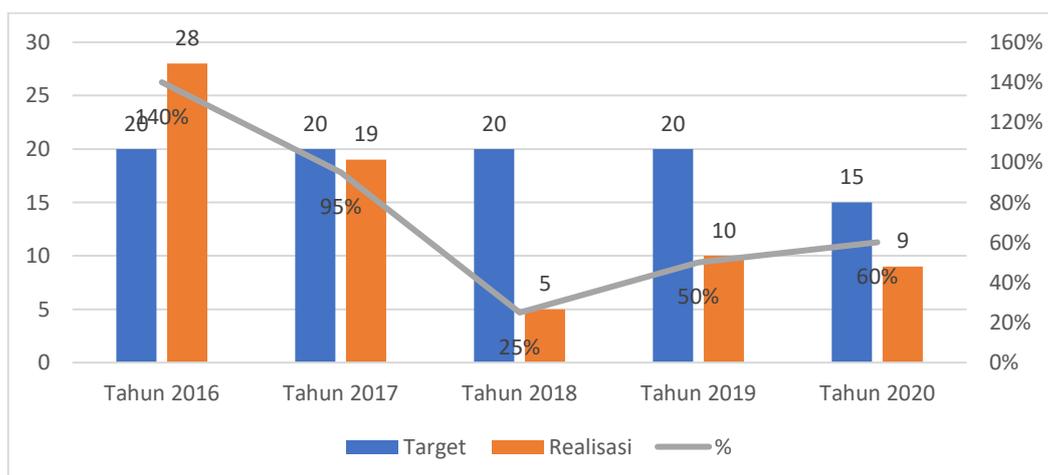


Gambar 12 Data capaian penyusunan Naskah Akademik RUU Tahun 2017-2020

Formulasi pengitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kinerja dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang selalu mencapai target, bahkan untuk tahun 2020 dari target 2 (dua) Naskah Akademik, berhasil menyusun 3 (tiga) Naskah Akademik atau dengan capaian 150%. Dan untuk tahun 2020, penyusunan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang juga berhasil diselesaikan penyusunannya.

IK3: Jumlah Naskah Akademik yang Diselaraskan



Gambar 13 Data Capaian Penyelarasan Naskah Akademik RUU periode Tahun 2016-2020

Formulasi pengitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

3.2. Sasaran Kegiatan 2

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Tabel 23 Sasaran Kegiatan 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk di Setiap Wilayah	175 DSH	115 DSH	65,71
2	Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan	150 Kegiatan	1.950 Kegiatan	1.300
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33 Kanwil	33 Kanwil	100
4	Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum	50 Penyuluh	54 Penyuluh	108

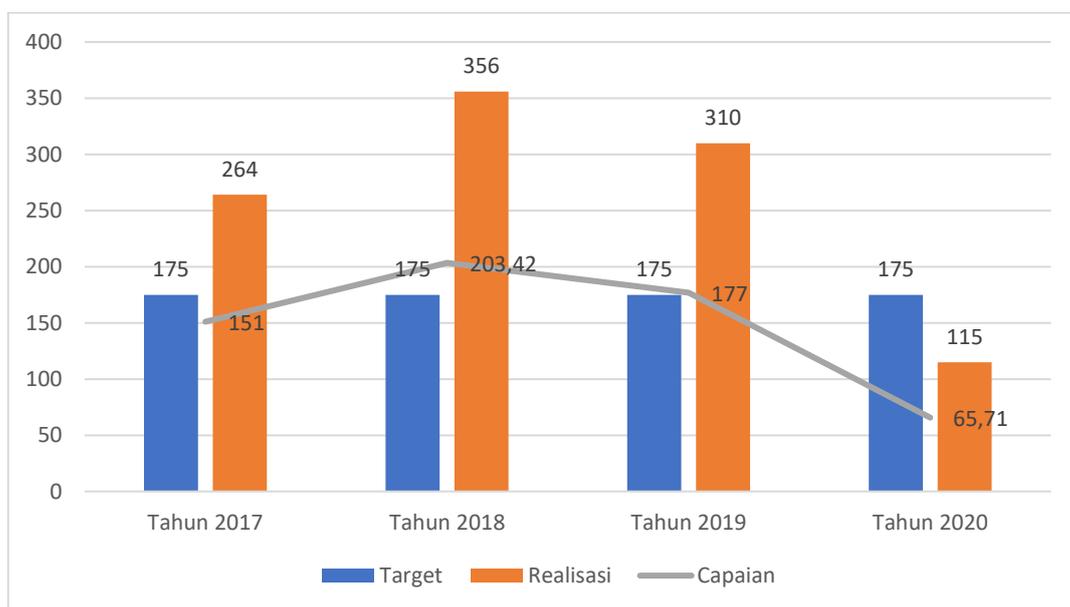
Formulasi pengitungan capaian: $Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$

Terkait dengan capaian realisasi pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, tidak mencapai target yang ditetapkan adalah disebabkan karena kondisi Indonesia yang sedang mengalami krisis pandemi covid-19 sehingga fokus utama pemerintah daerah dialihkan untuk menangani penyebaran covid-19 dan tidak melakukan kegiatan dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Selain itu kegiatan peresmian yang merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi masyarakat desa / kelurahan di bidang hukum adalah melalui kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar untuk tahun ini juga ditunda pelaksanaannya sesuai dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor : PHN-HN.04.0416 tanggal 08 Juli 2020 perihal penundaan kegiatan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun Anggaran 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mendukung tatanan normal baru (new normal). Namun demikian ada 115 Desa/Kelurahan sadar hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan telah diberikan apresiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.02.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 30 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan tahun

2019, realisasi pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dengan target yang sama adalah 310 DSH atau sebesar 177%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, dengan target yang sama realisasinya adalah 356 DSH atau 203,42% sedangkan untuk tahun 2017 realisasinya adalah 264 DSH atau 151%.

Jika dilihat dalam bentuk grafis sasaran dan capaian dengan indikator jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di setiap wilayah adalah sebagai berikut:

SK2.IK1: Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk di Setiap Wilayah



Gambar 14 Data Realisasi DSH yang terbentuk di Seluruh Wilayah Tahun 2017-2020

Formulasi penghitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa target indikator kinerja 1 selalu tercapai bahkan melebihi target, kecuali pada tahun 2020 dengan alasan dan penyebab yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika dibandingkan antara tahun 2017 dengan tahun 2018, capaian atas target pembentukan Desa Sadar Hukum sangat signifikan. Pada tahun 2018 realisasinya adalah 356 atau 203,42% dibandingkan tahun 2017 yang realisasinya 264 atau 151% maka selisih peningkatannya adalah 51,42%. Namun pada tahun 2019 meskipun melampaui target tetapi mengalami penurunan pencapaian dari tahun 2018 dan tetap melampaui capaian pada tahun

2017 yakni 310 Desa Sadar Hukum atau 177%. Ini berarti ada penurunan capaian sebesar 26,42% dari tahun 2018.

Berbeda dengan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan target 150 kegiatan realisasinya sangat tinggi hingga mencapai 1.950 Kegiatan atau sebesar 1.300% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 24 Data Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JUMLAH PELAKSANAAN
1	Penyuluhan Hukum	8 Kegiatan
2	Penyuluhan Hukum Keliling	10 Kegiatan
3	Dialog Perbincangan Penyuluhan Hukum di Radio	7 Kegiatan
4	Pameran Penyuluhan Hukum	1 Kegiatan
5	Konsultasi Hukum Langsung	18 Konsultasi
6	Konsultasi Hukum Online	1.906 Konsultasi
Jumlah		1.950 Kegiatan

Selama tahun 2020, kegiatan tatap muka dibatasi mengingat penyebaran virus covid, sehingga lebih banyak konsultasi hukum dilakukan secara online melalui lsc.bphn.go.id yang memanfaatkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum untuk menjawab setiap pertanyaan atau konsultasi hukum dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pelaksanaan penyuluhan hukum dengan target yang sama (150 kegiatan) realisasinya adalah 443 kegiatan atau 295,33% yang berarti ada peningkatan hingga lebih dari 1.000%. Meskipun didominasi oleh kegiatan konsultasi hukum secara online namun mengingat kondisi pandemi pada tahun 2020, peningkatan pelayanan konsultasi hukum dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi merupakan suatu inovasi dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

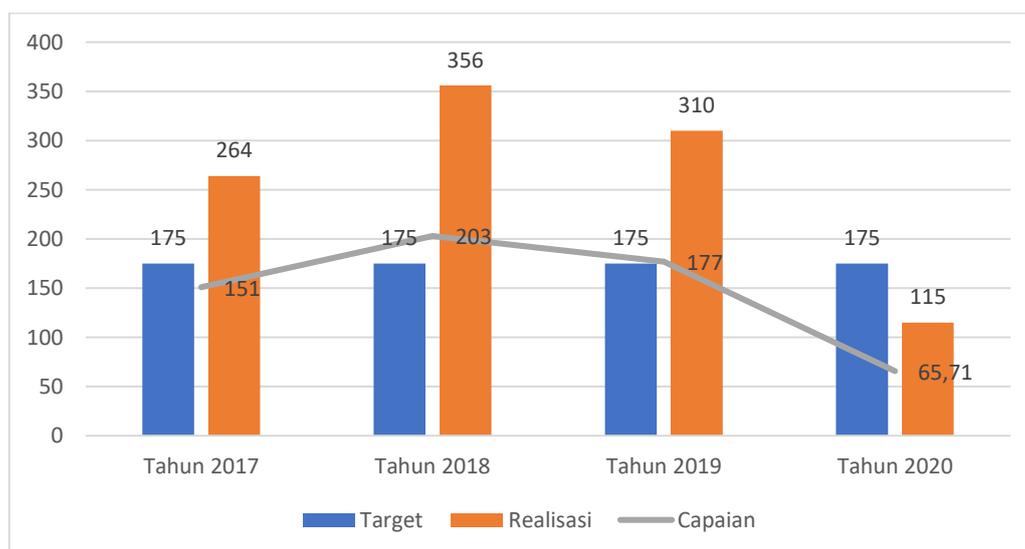
Untuk indikator kinerja 3, terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di seluruh wilayah, dengan target 33 Kanwil, selalu tercapai sesuai dengan target. Dan indikator kinerja 4, jumlah instrumen pendukung pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum, dengan target 50 Penyuluh Hukum capaiannya adalah 54 Penyuluh hukum atau sebesar 108%. Jumlah realisasi tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yang berarti tidak ada peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja dalam 2 tahun terakhir namun demikian target telah terpenuhi.



Berikut ini tabel perbandingan capaian kinerja SK2 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan indikator kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020:

Indikator Kinerja	2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk di Setiap Wilayah	175	310	203	175	115	177
Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan	150	443	295,33	150	1.950	1.300
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33	33	100	33	33	100
Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum	50	54	108	50	54	108

Berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja per indikator kinerja pada Sasaran Kinerja 2 sepanjang periode 2017 – 2020:



Formulasi pengitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$



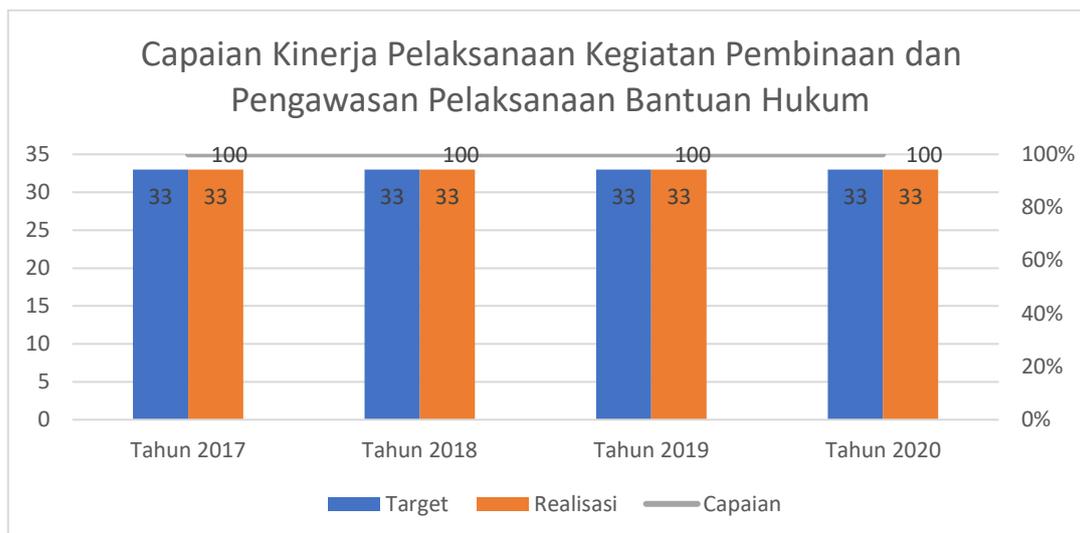
Gambar 15 Indikator Kinerja : Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk Tahun 2017-2020



Gambar 16 Indikator Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan

Formulasi penghitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun 2017 – 2020, jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 realisasi tidak memenuhi target, sehingga dilakukan evaluasi terhadap penetapan target. Meskipun target kinerja pada tahun-tahun berikutnya diturunkan dari jumlah target Tahun 2017, namun secara kualitas pelaksanaan kegiatan tetap dioptimalkan. Pada tahun 2018 dengan target 150 kegiatan penyuluhan hukum, realisasinya bisa mencapai 260 kegiatan. Lalu pada tahun 2019 dengan target yang sama mengalami peningkatan realisasi hingga 443 kegiatan dan pada tahun 2020 mencapai realisasi yang sangat signifikan hingga 1.950 kegiatan yang didominasi kegiatan konsultasi hukum secara daring (online) melalui <https://lsc.bphn.go.id/>.



Gambar 17 Indikator Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah

Formulasi penghitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Pusat. BPHN telah melakukan pembinaan di daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM yang ada di 33 Provinsi melalui mekanisme Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Adapun mekanisme pelaksanaannya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor PHN-HN.03.03-36 Tahun 2016.

Pelaksanaan pengawasan juga disertai dengan evaluasi terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui pelaksanaan survei indeks kepuasan layanan bantuan hukum. Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dilakukan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, kegiatan ini merupakan controlling pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan Panitia Pengawas Pusat (Panwaspus) terhadap kinerja OBH selaku Pemberi Bantuan Hukum dan kinerja Kantor Wilayah selaku Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). BPHN selaku Panwaspus memiliki peran besar dalam terorganisirnya penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal menjaga kualitas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin. Pemantauan dan Evaluasi oleh Panwaspus dilakukan secara langsung ke beberapa provinsi sebagai data sampling. Pemantauan di Kantor Wilayah secara langsung berupa kegiatan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan

OBH, serta melakukan wawancara dengan Penerima Bantuan Hukum untuk menilai kinerja layanan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan OBH.

Kegiatan Penilaian Kepuasan Layanan Bantuan Hukum telah dilaksanakan oleh Panwasda dengan melakukan wawancara terhadap 691 (enam ratus Sembilan puluh satu) Penerima Layanan Bantuan Hukum pada 268 (dua ratus enam puluh delapan) Pemberi Bantuan Hukum dari total 524 Pemberi Bantuan Hukum, dengan menghasilkan Nilai Kinerja Pemberi Bantuan Hukum sebagai indikator dari Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum, yang dapat dilihat dalam tabel Kinerja Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut:

Tabel 25 Tabel Kinerja PBH Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020

NO	NILAI KINERJA	JUMLAH PBH
1	Baik	85
2	Cukup	181
3	Buruk	2

Evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum bukan hanya dilakukan melalui metode monitoring secara langsung melalui sampling wilayah, namun juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara online melalui aplikasi sidbankum.bphn.go.id.

Monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum menggunakan instrumen kuesioner. Metode ini menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap proses pemberian bantuan hukum. Untuk dapat melakukan pengukuran maka kuesioner didasarkan pada parameter dan indikator yang disebut indeks OBH yang disusun berdasarkan persepsi Penerima Bantuan Hukum, yakni:

- a. Informasi tentang bantuan hukum
Darimanakah informasi yang didapat oleh penerima bantuan hukum tentang bantuan hukum;
- b. Pengetahuan tentang bantuan hukum
Pengetahuan yang dimiliki oleh penerima bantuan hukum tentang bantuan hukum itu sendiri;
- c. Layanan bantuan hukum
Bagaimana penerima bantuan hukum mendapatkan layanan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum

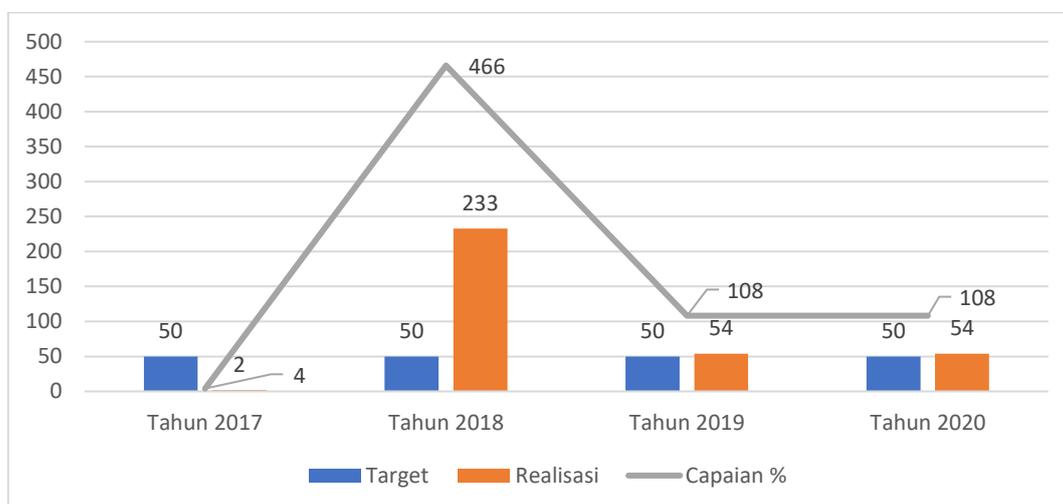


- d. Integritas bantuan hukum Integritas pemberi bantuan hukum, terhadap komitmen dan ketaatan pada perundangan yang berlaku dan tindakan anti korupsi dan kolusi.

Berdasarkan urutan parameter di atas, maka pelayanan dan integritas OBH merupakan parameter terpenting sehingga Layanan Bantuan Hukum dinilai 40%, kemudian Integritas OBH 30%, Pengetahuan tentang Prosedur Hukum penerima manfaat sebesar 20% dan Informasi tentang Bantuan Hukum sebesar 10%. Jika dilihat dalam bentuk tabel maka indek tersebut terlihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 26 Indeks OBH

NO	KRITERIA	NILAI INDEKS
1	Informasi tentang bantuan hukum	10%
2	Pengetahuan tentang prosedur hukum yang dijalani	20%
3	Layanan bantuan hukum	40%
4	Integritas bantuan hukum	30%
Total		100%



Gambar 18 Indikator Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum

Formulasi pengitungan capaian:
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan, indikator jumlah instrumen hukum yan mendukung terbentuknya pejabat fungsional Penyuluh Hukum pada Tahun 2017 sangat rendah realisasinya yakni hanya 2 Penyuluh. Pada tahun 2017 ada kebijakan

moratorium penerimaan CPNS hingga tahun 2019 sehingga tidak ada penambahan formasi PNS dengan jabatan Penyuluh hukum. Selain itu pada tahun 2017 masih dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi calon pejabat fungsional hukum untuk memenuhi syarat diangkat sebagai Penyuluh hukum. Penyebab lain adalah pada tahun 2017 banyak pegawai dari instansi lain yang berminat untuk inpassing menjadi Penyuluh Hukum, namun karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga tidak mendapatkan persetujuan dari instansi asal, dan ini terjadi juga dalam Kementerian hukum dan HAM sendiri termasuk BPHN. Pada tahun 2018 realisasi pengangkatan JFT Penyuluh hukum meningkat sangat drastis, hingga 233 Penyuluh yang semuanya melalui jalur Inpassing. Kemudian pada tahun 2019 realisasi target menurun hanya 54 penyuluh. Ini juga merupakan penurunan yang drastis meskipun masih tetap memenuhi target yang sudah ditetapkan. Dan pada tahun 2020 realisasi juga 54 penyuluh hukum mengingat pada tahun 2020 tidak ada pelaksanaan inpassing atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Penyuluh Hukum. Penyuluh hukum yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah proses pada tahun sebelumnya.

3.3. Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum dengan Tersediannya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, pencapaian terhadap sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum dengan Tersediannya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-Undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Sasaran Kegiatan 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1	Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang Terintegrasi Secara Online Dalam Sistem Jaringan Informasi	25 Anggota	255 Anggota	1.020%
2	Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	100 Dokumen	83.910 Dokumen	83.910%

Pencapaian pada tiap-tiap indikator dijelaskan dengan cara penghitungan:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

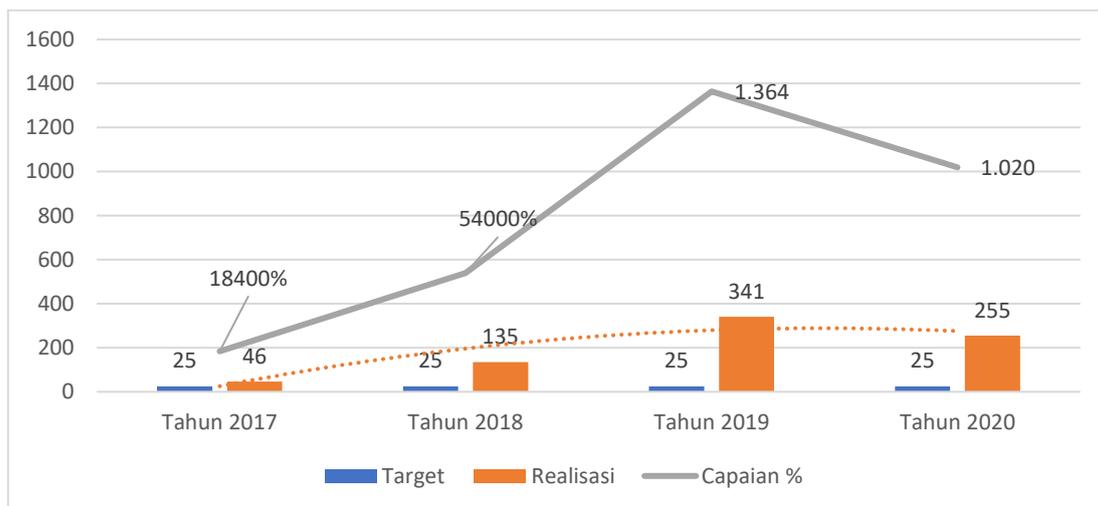


SK3.1. Indikator jumlah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi

Terkait indikator 1, jumlah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, capaian kinerjanya melebihi target yang ditentukan. Dari target 25 (dua puluh lima) anggota JDIH terintegrasi, telah tercapai 255 (dua ratus lima puluh lima) anggota (1.020%). Selain proses penanaman aplikasi integrasi (application programming interface) pada server Website JDIH anggota jaringan yang berjalan dengan baik, peningkatan kinerja tersebut juga disebabkan dengan perbaikan manajemen pengelolaan JDIH baik dari sisi teknologi informasi (pengembangan aplikasi dan penyediaannya untuk anggota) dan pembinaan terhadap anggota JDIH yang dilaksanakan begitu massif baik di tingkat Kementerian/LPNK, pemerintah daerah dan anggota yang lain.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, dengan target yang sama, realisasi jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi adalah 341 Anggota atau 1,364%. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 344%. Besarnya jumlah anggota JDIH yang terintegrasi pada tahun 2019 salah satunya adalah karena adanya integrasi ulang terhadap anggota jaringan dikarenakan adanya penerapan sistem baru dari yang sebelumnya menggunakan alamat domain www.jdihn.id dengan aplikasi integrasi JDIHN versi 2017 beralih pada aplikasi integrasi JDIHN versi 2019 sehingga mewajibkan anggota JDIHN yang telah terintegrasi pada tahun 2016-2018 untuk melakukan integrasi ulang. Sedangkan penurunan pada tahun 2020 disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 sehingga sangat membatasi adanya pertemuan secara fisik dengan anggota jaringan mengakibatkan pola pembinaan anggota jaringan lebih banyak dilakukan secara virtual. Meskipun demikian capaian 1.020% ini adalah sebuah terobosan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengintegrasian anggota jaringan.

Perbandingan Target dan capaian kinerja indikator Jumlah Anggota JDIH yang terintegrasi tahun 2017 dan 2020 adalah sebagai berikut:



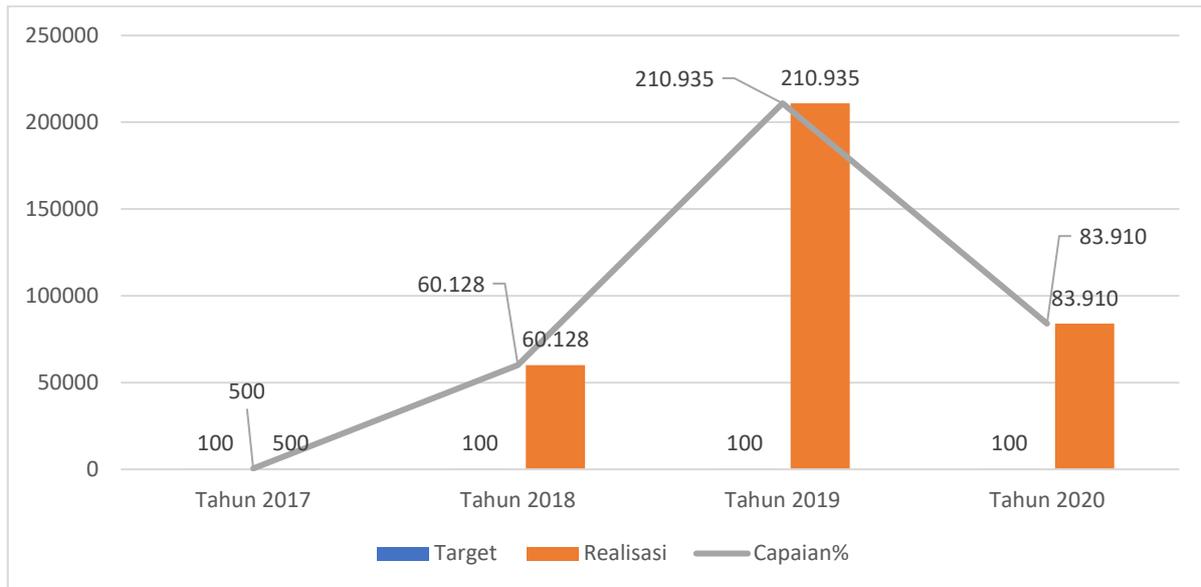
Gambar 19 Jumlah Anggota Jaringan Hukum yang Terintegrasi dalam Sistem Jaringan Informasi

Formulasi pengitungan capaian:
$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

SK3.2. Indikator Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional

Terkait dengan dokumen hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database jaringan informasi hukum pada tahun 2020 realisasinya sangat signifikan dari target 100 dokumen, realisasinya mencapai 83.910 dokumen hukum atau 83.910%. Namun capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebanyak 210.935 dokumen atau 210.935%. Artinya capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 127.025%. hal ini disebabkan pada tahun 2020 kegiatan asistensi yang biasanya dilakukan secara langsung diminimalisir untuk menghindari penularan virus covid-19. Namun demikian capaian tahun 2020 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing mencapai 500 dokumen untuk tahun 2017 dan 60.128 Dokumen pada tahun 2018.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja indikator data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional periode 2017-2020:



Gambar 20 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2017-2020

Formulasi penghitungan capaian:
$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

Tingginya jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional pada Tahun 2019 dikarenakan keaktifan Anggota JDIH dalam mengelola dokumen hukum yang tersedia serta dengan adanya penambahan jumlah laman JDIH baru. Selain pengelolaan dokumen, kegiatan yang dilakukan oleh Anggota JDIH dalam melakukan Kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi yang dilaksanakan pada masing-masing wilayah dengan Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota serta kegiatan Konsultasi dan Koordinasi oleh Anggota JDIH juga berpengaruh pada jumlah peningkatan tersebut.

3.4. Sasaran Kegiatan 4

Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Hukum.

Tabel 28 Sasaran Kegiatan 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	100
2	Tersusunnya Dokumen SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Formulasi penghitungan capaian:
$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

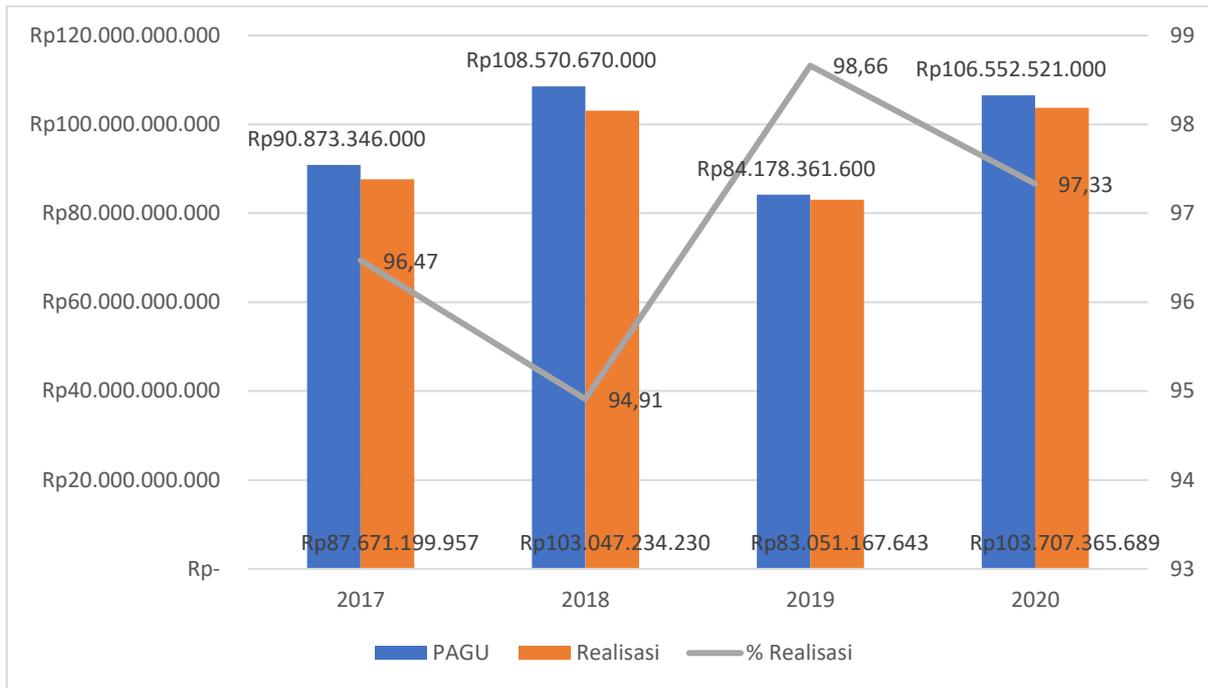
Untuk sasaran kegiatan 4, target yang ditetapkan selalu tercapai 100% pada tahun 2020. Pada tahun 2019 dengan target yang sama realisasinya juga tercapai 100% untuk setiap indikator kinerja. Demikian juga dengan tahun 2017 dan 2018, dengan target yang sama realisasinya juga memenuhi target atau capaiannya 100% dan tidak pernah melebihi target.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp103.707.365.689 atau sebesar 97,33% dari total pagu sebesar Rp106.552.521.000. Presentasi realisasi ini agak menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 97,97% dari total pagu Rp104.657.846.027. Anggaran ini sudah termasuk anggaran kegiatan pembinaan Hukum di Wilayah. Pagu BPHN sendiri untuk pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 adalah Rp42,721,171,000,- yang kemudian direvisi untuk difocusing pada penanganan covid-19 sehingga total Pagu akhir adalah Rp39.634.524.000, dengan serapan Rp38.293.829.111 atau sebesar 96,62%.

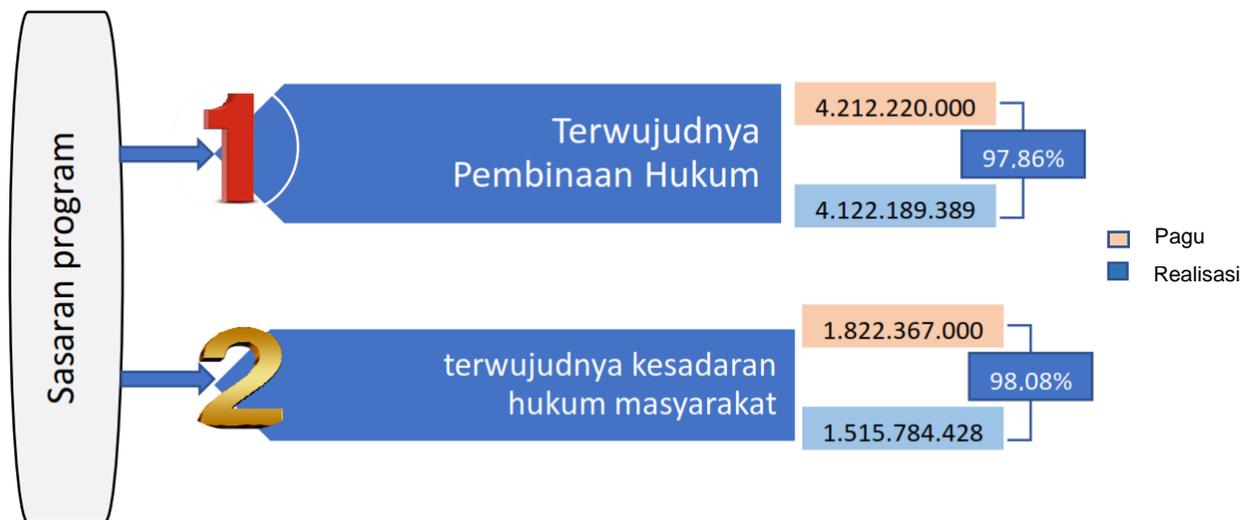
Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2017-2020 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:





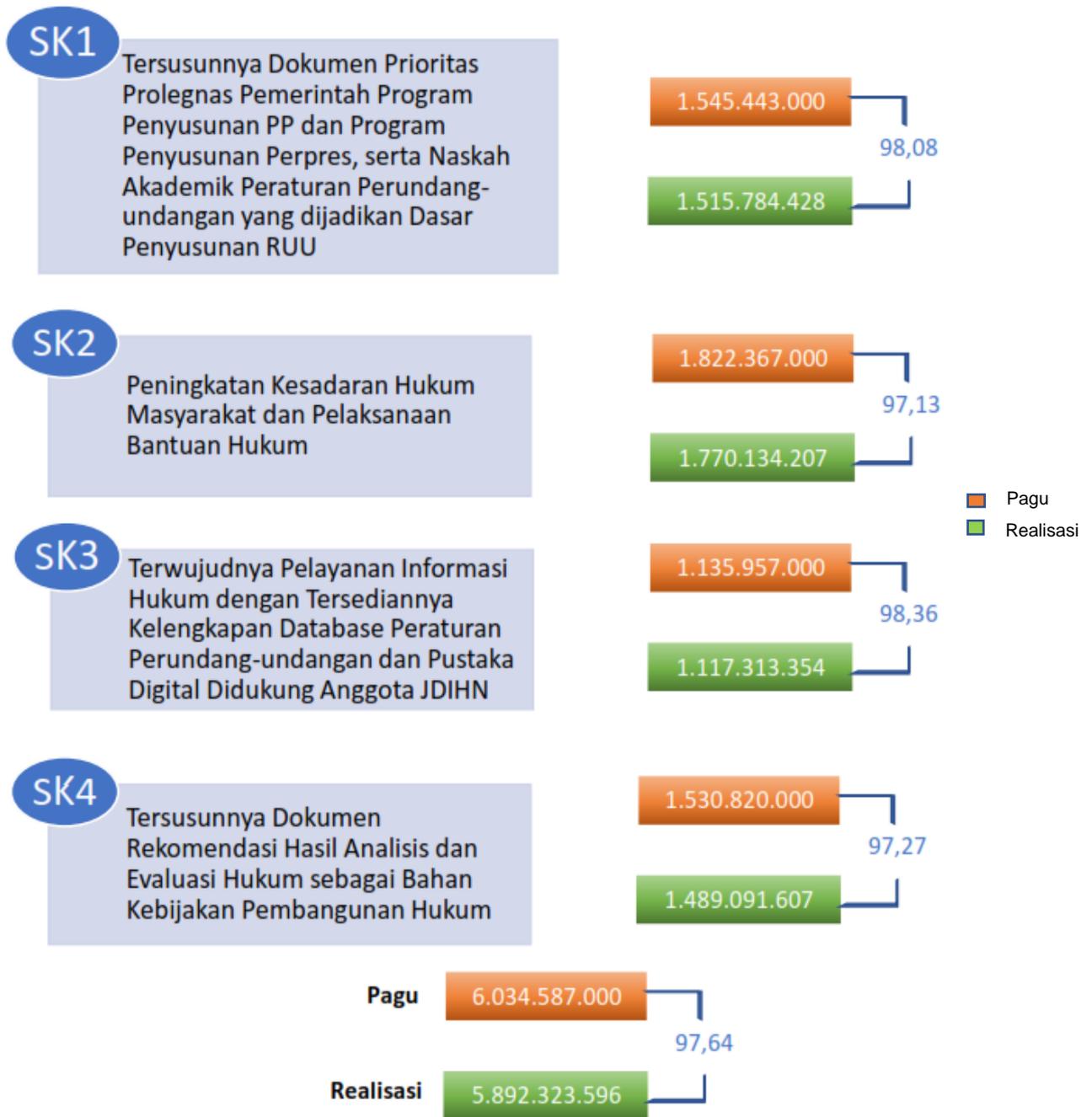
Gambar 21 Anggaran dan Realisasi BPHN Tahun 2017-2020

penghitungan capaian realisasi anggaran : $\frac{Realisasi}{Pagu} \times 100\%$



Gambar 22 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Program Tahun 2020

penghitungan capaian realisasi anggaran : $\frac{Realisasi}{Pagu} \times 100\%$

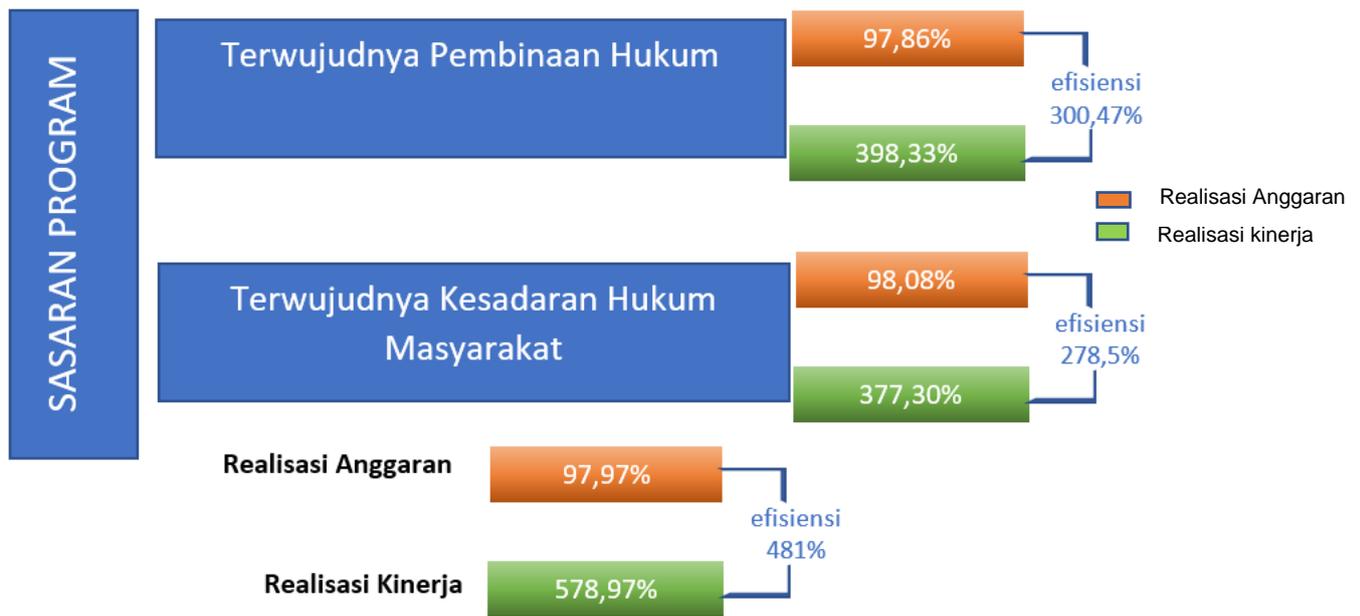


Gambar 23 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2020

$$\text{penghitungan capaian realisasi anggaran} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total Pagu}} \times 100\%$$

Rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran 9

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 578,97% maka realisasi anggaran sebesar 97,97% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 481% dengan rincian sebagai berikut:



$$\text{Efisiensi Kinerja} = \text{Realisasi Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

Adapun khusus kegiatan Prioritas Nasional, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp53,229,154,528 (98,66%) dari alokasi sebesar Rp53,951,410,000. Realisasi tersebut terbagi dalam 4 Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh BPHN yaitu:



$$\text{Capaian Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Jumlah Pagu}} \times 100\%$$

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA PADA TAHUN 2020

1. Perumusan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional menurut Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang salah satu fungsinya adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Hukum Nasional. Pada tahun 2020 telah disusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk mendukung pelaksanaan program bantuan hukum yakni:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

2. Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Pada tahun 2020 Badan Pembinaan Hukum Nasional telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 maupun perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran program dan kegiatan menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja dipengaruhi oleh pihak eksternal dan kondisi pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020. Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 secara keseluruhan bisa dinyatakan berhasil, dengan melihat capaian rata-rata indikator kinerja utama. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dan Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski banyak kendala dalam pencapaian target kinerja namun upaya untuk tetap menjaga kinerja terus dilakukan salah satunya melalui monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan tingkat wilayah. Selain itu kegiatan yang biasanya dilakukan melalui tatap muka diubah menjadi daring. Perubahan anggaran melalui refocusing juga belum disertai dengan perubahan perjanjian kinerja sehingga menimbulkan masalah tersendiri dalam penyusunan laporan capaian kinerja yang berbasis pada perjanjian kinerja. Kedepannya kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja.



LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 19 November 2019

Pihak Pertama,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

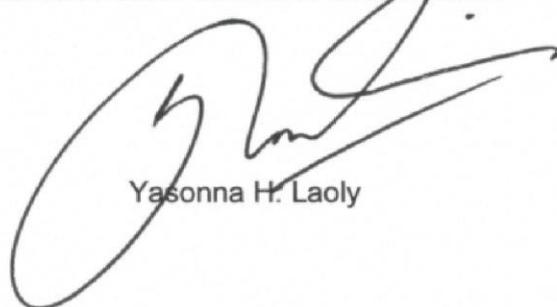
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi
		Jumlah RUU dalam Prolegnas pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan hukum nasional	20 RUU
		Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 Anggota Jaringan
2.	Terwujudnya Keadaran Hukum Masyarakat	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 desa
		Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	6.500 orang

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp. 109.639.168.000,-
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.749.425.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.289.900.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.895.500.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.702.509.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 34.083.837.000,-
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 66.917.997.000,-

Jakarta, 19 November 2019

Pihak Pertama,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.R. Benny Riyanto
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

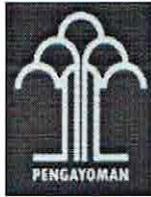
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 November 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Audy Murfi M.Z, S.H., M.H
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Audy Murfi M.Z, S.H., M.H
NIP. 19630327 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Fungsi dan Tugas Organisasi Secara Optimal dengan Dukungan SDM yang Handal, Perencanaan Program dan Anggaran yang Terpadu, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang Baik serta Pengelolaan BMN yang Tepat dan Transparan	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Anggaran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	2 Dokumen
		2. Terselenggaranya Layanan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	12 Bulan Layanan
		3. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Data Informasi Hasil Kegiatan dan Anggaran serta Laporan Kinerja Kegiatan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	2 Dokumen
		4. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BPHN dengan Didukung Sistem Administrasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	250 Pegawai
		5. Terbangunnya Citra Positif BPHN, Administrasi Kerjasama dan Terselenggaranya Sistem Penatausahaan dan Arsip BPHN	12 Bulan Layanan
		6. Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang Akuntabel dan Transparan	12 Bulan Layanan
		7. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 Bulan Layanan

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp. 2.940.590.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 6.387.000.000,-
3.	Layanan Perkantoran	Rp. 24.756.247.000,-
JUMLAH		Rp. 34.083.837.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Audy Murfi M.Z, S.H., M.H
NIP. 19630327 198903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum
NIP. 19620926 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Prioritas Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres, serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Penyusunan RUU	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Prolegda	3 Dokumen
		2. Jumlah Naskah Akademik RII Yang Disusun	3 Naskah
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan	15 Penyelarasan
		4. Jumlah Naskah Akademik RUU Badan Usaha Yang Disusun	1 Naskah

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Dokumen Program Legislasi	Rp. 680.568.000,-
2.	Naskah Akademik RUU	Rp. 391.941.000,-
3.	Penyelarasan Naskah Akademik	Rp. 480.000.000,-
4.	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	Rp. 150.000.000,-
JUMLAH		Rp. 1.702.509.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional



Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum
NIP. 19620926 198903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H
NIP. 19630123 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Hukum.	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	12 Rekomendasi
		2. Tersusunnya Dokumen SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1 Dokumen
		3. Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1 Dokumen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 1.718.390.000,-
2.	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 121.510.000,-
3.	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 450.000.000,-
JUMLAH		Rp. 2.289.900.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



Liestiarini Wulandari, S.H., M.H
NIP. 19630123 198903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Yasmon, M.L.S
Jabatan : Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan
Informasi Hukum Nasional

Drs. Yasmon, M.L.S
NIP. 19680520 199403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum dengan Tersediannya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN	1. Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang Terintegrasi Secara Online Dalam Sistem Jaringan Informasi	25 Anggota
		2. Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	100 Dokumen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Sasaran Anggota JDIHN	Rp. 1.203.315.000,-
2.	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online	Rp. 546.110.000,-
JUMLAH		Rp. 1.749.425.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional



Drs. Yasmon, M.L.S
NIP. 19680520 199403 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H
NIP. 19620413 198203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1. Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk di Setiap Wilayah	175 DSH
		2. Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan	150 Kegiatan
		3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33 Kanwil
		4. Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum	50 Penyuluh

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Desa Sadar Hukum	Rp. 1.153.893.000,-
2.	Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 237.195.000,-
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	Rp. 754.185.000,-
4.	Penyuluh Hukum Nasional	Rp. 750.227.000,-
JUMLAH		Rp. 2.895.500.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum



Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H
NIP. 19620413 198203 1 001

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
 3. PROGRAM : Program Pembinaan Hukum Nasional
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Badan Pembinaan Hukum Nasional
 5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2020 (RIBU)
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	53.951.410,0
05.03	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	53.951.410,0
	Total	53.951.410,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Terwujudnya Pembinaan Hukum		109.639.168,0
01.01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	
01.02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Peppers yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	
01.03	Jumlah anggota JDH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	
01.04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	
01.05	Jumlah orang/keompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	
	Total		109.639.168,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Pembinaan Hukum Nasional	109.639.168,0
01.01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	
01.02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Peppers yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	
01.03	Jumlah anggota JDH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	
01.04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	
01.05	Jumlah orang/keompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	
01.06	Layanan Internal Eselon I	
	Total	109.639.168,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN			HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2021	2022	2023
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN									
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.749.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.749.425,0	1.749.425,0	1.749.425,0	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.289.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.289.900,0	2.289.900,0	2.289.900,0	
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.895.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.895.500,0	2.895.500,0	2.895.500,0	
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	1.702.509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.702.509,0	1.702.509,0	1.702.509,0	
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	34.083.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.083.837,0	34.083.837,0	34.083.837,0	
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	66.917.997,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.917.997,0	66.917.997,0	66.917.997,0	
	Total	109.639.168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.639.168,0	109.639.168,0	109.639.168,0	

Jakarta, 20 Februari 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	RUPIAH	RMP		PINJAMAN		RIMBOKABILREIN/DHMAN			TAHUN 2020			TOTAL
				RMP	PLN	HIBAH			PNBP	PDB	SBSN	BLU		
						RMP	PLN	RMP					HLN	
01	Terintegrasi anggota jaringan secara online dan terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem jaringan informasi hukum nasional		1.749.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.749.425,0
01.001	Sasaran Anggota JDJHN		1.203.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.203.315,0
01.001.001	Tanpa Sub Output		1.203.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.203.315,0
01.001.001.051	Anggota JDJHN yang Aktif dan Terintegrasi		898.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898.528,0
01.001.001.052	Promosi dan Kerjasama JDJHN	Utama	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
01.001.001.053	Pemberian Bimbingan Teknis Bagi Anggota JDJH	Utama	91.697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.697,0
01.001.001.054	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi dan Basis Data Nasional	Utama	188.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.090,0
01.002	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online		546.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546.110,0
01.002.001	Tanpa Sub Output		546.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546.110,0
01.002.001.051	Pengelolaan Perpustakaan Hukum	Utama	134.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134.190,0
01.002.001.052	Peningkatan Kapasitas Pustakawan	Utama	137.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137.920,0
01.002.001.053	Melakukan Penerbitan Majalah Hukum (Indonesia dan Inggris) Hasil Kegiatan BPHN	Utama	274.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274.000,0
	Total		1.749.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.749.425,0

Jakarta, 20 Februari 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.002	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum				Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Penataan Regulasi	Pembentukan Pusat Legislasi Nasional	000 - Bukan Tematik		tidak	121.510,0
01.002.001	tanpa suboutput				Pembentukan Pusat Legislasi Nasional	Penataan Regulasi	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan				121.510,0
	051 - Persiapan Penyusunan SOP dan Rintisan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum											63.010,0
	052 - Penyusunan SOP dan Rintisan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum											58.500,0
01.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional								000 - Bukan Tematik		tidak	450.000,0
01.005.001	tanpa sub output											58.500,0
	051 - Menyusun DPHN											450.000,0
	052 - Penerbitan Jurnal Analisis dan Evaluasi Hukum (Jurnal Rechtsvinding)											282.420,0
												282.420,0
												167.580,0
												167.580,0
												2.289.900,0
												2.289.900,0
Total												

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020						PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)				
						2021	2022	2023	2021	2022	2023		
01	Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional				2.289.900,0				2.289.900,0	2.289.900,0	2.289.900,0	2.289.900,0	
01.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	12	Rekomendasi		1.718.390,0				1.718.390,0	1.718.390,0	1.718.390,0	1.718.390,0	
01.001.001	tanpa sub output				1.718.390,0				1.718.390,0	1.718.390,0	1.718.390,0	1.718.390,0	
01.001.001.051	Analisa dan Evaluasi Hukum	12,0	Rekomendasi	118.805,0	1.425.660,0	12,0	12,0	12,0	1.425.660,0	1.425.660,0	1.425.660,0	1.425.660,0	
01.001.001.052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	12,0	Rekomendasi	4.478,8	53.745,0	12,0	12,0	12,0	53.745,0	53.745,0	53.745,0	53.745,0	
01.001.001.053	Pengelolaan dan Penggunaan Sistem Aplikasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1,0	Aplikasi	238.985,0	238.985,0	1,0	1,0	1,0	238.985,0	238.985,0	238.985,0	238.985,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023
01.002	Penyusunan SOP Mengenal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1	Dokumen		121.510,0				121.510,0	121.510,0	121.510,0
01.002.001	tanpa suboutput				121.510,0				121.510,0	121.510,0	121.510,0
01.002.001.051	Persiapan Penyusunan SOP dan Rintisan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	1,0	Dokumen	63.010,0	63.010,0	1,0	1,0	1,0	63.010,0	63.010,0	63.010,0
01.002.001.052	Penyusunan SOP dan Rintisan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	1,0	Dokumen	58.500,0	58.500,0	1,0	1,0	1,0	58.500,0	58.500,0	58.500,0
01.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1	Dokumen		450.000,0				450.000,0	450.000,0	450.000,0
01.005.001	tanpa sub output				450.000,0				450.000,0	450.000,0	450.000,0
01.005.001.051	Menyusun DPHN	1,0		282.420,0	282.420,0	1,0	1,0	1,0	282.420,0	282.420,0	282.420,0
01.005.001.052	Penerbitan Jurnal Analisis dan Evaluasi Hukum (Jurnal Rechtsvinding)	1,0	dokumen	167.580,0	167.580,0	1,0	1,0	1,0	167.580,0	167.580,0	167.580,0
	Total				2.289.900,0	-	-	-	2.289.900,0	2.289.900,0	2.289.900,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											
			RUPIAH	PINJAMAN			HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						
01	Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional		2.289.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.289.900,0
01.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum		1.718.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.718.390,0
01.001.001	tanpa sub output		1.718.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.718.390,0
01.001.001.051	Analisa dan Evaluasi Hukum	Utama	1.425.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.425.660,0
01.001.001.052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Utama	53.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53.745,0
01.001.001.053	Pengelolaan dan Penggunaan Sistem Aplikasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Pendukung	238.985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238.985,0
01.002	Penyusunan SOP Mengenal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum		121.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121.510,0
01.002.001	tanpa suboutput		121.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121.510,0
01.002.001.051	Persiapan Penyusunan SOP dan Rintisan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Utama	63.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.010,0
01.002.001.052	Penyusunan SOP dan Rintisan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Utama	58.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.500,0
01.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
01.005.001	tanpa sub output		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
01.005.001.051	Menyusun DPHN	Utama	282.420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282.420,0
01.005.001.052	Penerbitan Jurnal Analisis dan Evaluasi Hukum (Jurnal Rechtsvinding)	Pendukung	167.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167.580,0
	Total		2.289.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.289.900,0

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto

NIP. 196204101987031003

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						
01.001.001.052	Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	Utama	208.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208.600,0
01.002	Layanan Penyuluhan Hukum		237.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237.195,0
01.002.001	tanpa sub output		237.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237.195,0
01.002.001.051	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung	Utama	107.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.825,0
01.002.001.052	Kegiatan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung	Utama	129.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.370,0
01.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah		754.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754.185,0
01.003.001	Tanpa Sub Output		754.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754.185,0
01.003.001.051	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Pusat	Utama	291.025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291.025,0
01.003.001.052	Pengawasan Organisasi Bantuan Hukum	Pendukung	141.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141.200,0
01.003.001.053	Diseminasi Standar Layanan Bantuan Hukum	Utama	321.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321.960,0
01.004	Penyuluhan Hukum Nasional		750.227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750.227,0
01.004.001	Tanpa Sub Output		750.227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750.227,0
01.004.001.051	Penyusunan Regulasi dan Instrumen Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum	Pendukung	80.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.004,0
01.004.001.052	Pengembangan Kapasitas Kompetensi Penyuluhan Hukum	Utama	28.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.560,0
01.004.001.053	Pembinaan Penyuluhan Hukum	Utama	379.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379.276,0
01.004.001.054	Media Pemberdayaan Masyarakat	Utama	262.387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262.387,0
	Total		2.895.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.895.500,0

Jakarta, 20 Februari 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						
01.001	Dokumen Program Legislasi		680.568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680.568,0	
01.001.001	tanpa sub output		680.568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680.568,0	
01.001.001.051	Penyusunan Program Legislasi Nasional	Utama	306.346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.346,0	
01.001.001.052	Penyusunan Program Penyusunan PP dan PERPRES	Utama	241.334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241.334,0	
01.001.001.053	Pemantauan Prolegnas, Progsun PP dan Perpres Tahun 2020	Pendukung	33.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.352,0	
01.001.001.054	Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah	Utama	99.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99.536,0	
01.002	Naskah Akademik RUU		391.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391.941,0	
01.002.001	Tanpa Sub Output		391.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391.941,0	
01.002.001.051	Persiapan Penyusunan Naskah Akademik RUU	Utama	104.023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.023,0	
01.002.001.052	Penyusunan Naskah Akademik RUU	Utama	260.028,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260.028,0	
01.002.001.053	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Wilayah	Pendukung	27.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.890,0	
01.003	Penyelarasan Naskah Akademik		480.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480.000,0	
01.003.001	Tanpa Sub Output		480.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480.000,0	
01.003.001.051	Persiapan Awal Terhadap Naskah Akademik Yang Akan Diselaraskan	Utama	62.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.460,0	
01.003.001.052	Penyelarasan Terhadap Sistematisasi dan Materi Muatan Naskah Akademik	Utama	385.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385.700,0	
01.003.001.053	Penyusunan Laporan Hasil Penyelarasan	Utama	31.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.840,0	
01.004	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	
01.004.001	tanpa sub output		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	
01.004.001.051	Persiapan Naskah Akademik	Utama	6.301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.301,0	
01.004.001.052	Penyusunan Naskah Akademik	Utama	143.699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143.699,0	
	Total		1.702.509,0	0,0	1.702.509,0									

Jakarta, 20 Februari 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	001 - Gaji dan Tunjangan											15.680.453,0
		Pusat										15.680.453,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											9.075.794,0
		Pusat										9.075.794,0
Total												34.083.837,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)											
		TAHUN 2020					ALOKASI (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
01	Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional				34.083.837,0				34.083.837,0				34.083.837,0
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan		2.940.590,0				2.940.590,0				2.940.590,0
01.950.001	Tanpa Suboutput				2.940.590,0				2.940.590,0				2.940.590,0
01.950.001.051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	1,0	Dokumen	215.000,0	215.000,0	1,0	1,0	1,0	215.000,0	1,0	1,0	1,0	215.000,0
01.950.001.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1,0	Dokumen	102.376,0	102.376,0	1,0	1,0	1,0	102.376,0	1,0	1,0	1,0	102.376,0
01.950.001.053	Pengelolaan Data dan Informasi	1,0	Dokumen	130.000,0	130.000,0	1,0	1,0	1,0	130.000,0	1,0	1,0	1,0	130.000,0
01.950.001.054	Pengelolaan Keuangan	1,0	Dokumen	257.725,0	257.725,0	1,0	1,0	1,0	257.725,0	1,0	1,0	1,0	257.725,0
01.950.001.055	Pengelolaan Perbendaharaan	1,0	Dokumen	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0
01.950.001.056	Pengelolaan Kepegawaian	1,0	Dokumen	316.124,0	316.124,0	1,0	1,0	1,0	316.124,0	1,0	1,0	1,0	316.124,0
01.950.001.057	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokol	1,0	Dokumen	1.167.066,0	1.167.066,0	1,0	1,0	1,0	1.167.066,0	1,0	1,0	1,0	1.167.066,0
01.950.001.058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1,0	Dokumen	308.600,0	308.600,0	1,0	1,0	1,0	308.600,0	1,0	1,0	1,0	308.600,0
01.950.001.059	Pelayanan Reformasi Birokrasi	1,0	Dokumen	343.699,0	343.699,0	1,0	1,0	1,0	343.699,0	1,0	1,0	1,0	343.699,0
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan		6.387.000,0				6.387.000,0				6.387.000,0
01.951.001	Tanpa Suboutput				6.387.000,0				6.387.000,0				6.387.000,0
01.951.001.051	Pengadaan kendaraan bermotor	1,0	layanan	790.000,0	790.000,0	1,0	1,0	1,0	790.000,0	1,0	1,0	1,0	790.000,0
01.951.001.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1,0	layanan	1.133.500,0	1.133.500,0	1,0	1,0	1,0	1.133.500,0	1,0	1,0	1,0	1.133.500,0
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1,0	layanan	1.678.583,0	1.678.583,0	1,0	1,0	1,0	1.678.583,0	1,0	1,0	1,0	1.678.583,0
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	0,0	layanan	Infinity	Infinity	0,0	0,0	0,0	2.784.917,0	0,0	0,0	0,0	2.784.917,0
01.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		24.756.247,0				24.756.247,0				24.756.247,0
01.994.001	Tanpa Suboutput				24.756.247,0				24.756.247,0				24.756.247,0
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	1,0	layanan	15.680.453,0	15.680.453,0	1,0	1,0	1,0	15.680.453,0	1,0	1,0	1,0	15.680.453,0
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	layanan	9.075.794,0	9.075.794,0	1,0	1,0	1,0	9.075.794,0	1,0	1,0	1,0	9.075.794,0
Total												34.083.837,0	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											
			RUPIAH	PINJAMAN			HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						
01	Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional		34.083.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.083.837,0
01:950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		2.940.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.940.590,0
01:950.001	Tanpa Suboutput		2.940.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.940.590,0
01:950.001.051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Utama	215.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0
01:950.001.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	102.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102.376,0
01:950.001.053	Pengelolaan Data dan Informasi	Utama	130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0
01:950.001.054	Pengelolaan Keuangan	Utama	257.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257.725,0
01:950.001.055	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01:950.001.056	Pengelolaan Kepegawaian	Utama	316.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316.124,0
01:950.001.057	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokol	Utama	1.167.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.167.066,0
01:950.001.058	Pelayanan Umum dan Perangkapan	Utama	308.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.600,0
01:950.001.059	Pelayanan Reformasi Birokrasi	Utama	343.699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343.699,0
01:951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		6.387.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.387.000,0
01:951.001	Tanpa Suboutput		6.387.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.387.000,0
01:951.001.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Utama	790.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790.000,0
01:951.001.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Utama	1.133.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.133.500,0
01:951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Utama	1.678.583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.678.583,0
01:951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Utama	2.784.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.784.917,0
01:994	Layanan Perkantoran		24.756.247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.756.247,0
01:994.001	Tanpa Suboutput		24.756.247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.756.247,0
01:994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	15.680.453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.680.453,0
01:994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	9.075.794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.075.794,0
	Total		34.083.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.083.837,0

Jakarta, 20 Februari 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto

NIP. 196204101987031003

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									11.520,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									24.190,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									8.040,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									24.701,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									4.163,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									21.111,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,0
01.007	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)								000 - Bukan Tematik		tidak	0,0
Total												66.917.997,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020							PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)							
						2021	2022	2023	2021	2022	2023					
01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah				66.917.997,0							66.917.997,0				66.917.997,0
01.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	5699	Orang		45.592.000,0							45.592.000,0				45.592.000,0
01.001.001	Tampa Sub Output				45.592.000,0							45.592.000,0				45.592.000,0
01.001.001.051	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	5.690,0	Orang	7.011,1	39.893.000,0	5.690,0	5.690,0	5.690,0	5.690,0	5.690,0		39.893.000,0	39.893.000,0	39.893.000,0	39.893.000,0	39.893.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020				PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	
01.001.001.052	Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	5.697,0	Orang	1.000,4	5.699.000,0	10.588,0	5.697,0	5.697,0	5.697,0	5.699.000,0	5.699.000,0	5.699.000,0
01.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	758	Kegiatan		8.087.900,0					8.087.900,0	8.087.900,0	8.087.900,0
01.002.001	Tanpa Sub Output				8.087.900,0					8.087.900,0	8.087.900,0	8.087.900,0
01.002.001.051	Penyebaruasan Informasi/Penanganan Perkara di luar Pengadilan	758,0	Kegiatan	9.740,0	7.382.920,0	758,0	758,0	758,0	758,0	7.382.920,0	7.382.920,0	7.382.920,0
01.002.001.052	Konseling dan Pembuatan Dokumen Hukum	758,0	Kegiatan	930,1	704.980,0	758,0	758,0	758,0	758,0	704.980,0	704.980,0	704.980,0
01.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	33	Kantor Wilayah		2.491.759,0					2.491.759,0	2.491.759,0	2.491.759,0
01.003.001	Tanpa Suboutput				2.491.759,0					2.491.759,0	2.491.759,0	2.491.759,0
01.003.001.051	Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia Pengawas Daerah	33,0	Kantor Wilayah	53.882,3	1.778.115,0	33,0	33,0	33,0	33,0	1.778.115,0	1.778.115,0	1.778.115,0
01.003.001.052	Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah)	26,0	Kantor Wilayah	27.447,8	713.644,0	26,0	26,0	26,0	26,0	713.644,0	713.644,0	713.644,0
01.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah		4.978.240,0					4.978.240,0	4.978.240,0	4.978.240,0
01.004.001	Tanpa Sub Output				4.978.240,0					4.978.240,0	4.978.240,0	4.978.240,0
01.004.001.051	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung	32,0	Penyuluhan	51.110,3	1.635.528,0	32,0	32,0	32,0	32,0	1.635.528,0	1.635.528,0	1.635.528,0
01.004.001.052	Penyuluhan Hukum Tidak Langsung	17,0	media	28.789,5	489.422,0	17,0	17,0	17,0	17,0	489.422,0	489.422,0	489.422,0
01.004.001.053	Pembinaan/Pembentukan Desa/kelurahan/Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum	29,0	Desa	98.389,3	2.853.290,0	29,0	29,0	28,0	28,0	2.853.290,0	2.853.290,0	2.853.290,0
01.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah		2.890.237,0					2.890.237,0	2.890.237,0	2.890.237,0
01.005.001	Tanpa Sub Output				2.890.237,0					2.890.237,0	2.890.237,0	2.890.237,0
01.005.001.051	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	33,0	dokumen	29.424,3	971.003,0	33,0	33,0	33,0	33,0	971.003,0	971.003,0	971.003,0
01.005.001.052	Analisa dan Evaluasi Hukum	33,0	rekomendasi	29.859,5	985.365,0	33,0	33,0	33,0	33,0	985.365,0	985.365,0	985.365,0
01.005.001.053	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	17,0	dokumen	26.598,2	452.170,0	17,0	17,0	17,0	17,0	452.170,0	452.170,0	452.170,0
01.005.001.054	Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	14,0	kegiatan	34.407,1	481.699,0	14,0	14,0	14,0	14,0	481.699,0	481.699,0	481.699,0
01.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDJHN	33	Kantor Wilayah		2.877.861,0					2.877.861,0	2.877.861,0	2.877.861,0
01.006.001	Tanpa Sub Output				2.877.861,0					2.877.861,0	2.877.861,0	2.877.861,0
01.006.001.051	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDJH	33,0	JDJH	49.423,9	1.630.988,0	33,0	33,0	33,0	33,0	1.630.988,0	1.630.988,0	1.630.988,0
01.006.001.052	Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi	33,0	JDJH	28.263,6	932.700,0	33,0	33,0	33,0	33,0	932.700,0	932.700,0	932.700,0
01.006.001.053	Peningkatan Layanan Perpustakaan	20,0	layanan	15.708,7	314.173,0	20,0	20,0	20,0	20,0	314.173,0	314.173,0	314.173,0
01.007	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	0	Peserta Kegiatan		0,0					0,0	0,0	0,0
	Total				66.917.997,0	-	-	-	-	66.917.997,0	66.917.997,0	66.917.997,0

Jakarta, 20 Februari 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

**Capaian Kinerja Kegiatan Penyelarasan Naskah Akademik
Tahun 2020**

NO	JUDUL NA RUU	PEMRAKARSA	Nomor Surat Keterangan Hasil Penyelarasan	Status
1	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja	Kemenko Perekonomian	Nomor: PHN – HN. 02.04-04, tertanggal 20 Januari 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan
2	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)	Kementerian Perdagangan	Nomor: PHN – HN. 02.04-02, tertanggal 15 Januari 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan
3	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States</i> (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA).	Kementerian Perdagangan	Nomor: PHN.HN.02.04.-08 tertanggal 10 Maret 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan
4	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan <i>ASEAN Agreement on Electronic Commerce</i> (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	Kementerian Perdagangan	Nomor: PHN-HN.02.04-09 Tanggal 30 April 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan
5	Naskah Akademik RUU tentang Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan	Nomor. PHN-HN.02.04-19 tertanggal 23 Desember 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan
6	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Fiji on Cooperation in the Field of Defence</i>).	Kementerian Pertahanan	Nomor. : PHN.-HN.02.04-20, tertanggal 23 Desember 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan

NO	JUDUL NA RUU	PEMRAKARSA	Nomor Surat Keterangan Hasil Penyelarasan	Status
7	NA RUU tentang Otsus Papua	Kementerian Dalam Negeri	Nomor : PHN-HN.02.04-15 tertanggal 30 September 2020	Selaras Sistematika dan Materi Muatan
8	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Russia Confederation</i>)	Kementerian Hukum dan HAM	Nomor: PHN-HN.02.04-18, tertanggal 23 Desember 2020	Dikembalikan untuk disempurnakan
9	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketenaganukliran	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan	Nomor: PHN-HN.02.04-17 tertanggal 23 Desember 2020	Dikembalikan untuk disempurnakan

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRAKARSA PEMERINTAH
YANG MENJADI PRIORITAS TAHUN 2020**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja	
2	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi	
3	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	
4	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	
5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika	
6	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	
7	Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara	
8	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
9	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	
10	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
11	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<i>Carry Over</i>
12	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	<i>Carry Over</i>
13	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	<i>Carry Over</i>
14	Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia	

**DATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIANALISIS DAN EVALUASI
TAHUN 2020**

Tema : Akses Pelayanan Bantuan Hukum		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Ubah (Mendesak)
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Ubah
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Ubah (tidak mendesak)
4.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	Ubah (tidak mendesak)
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009	Ubah (tidak mendesak)
6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Tetap terhadap ketentuan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi anak
7.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Tetap
8.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Tetap
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Tetap
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tetap
11.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Tetap
12.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Tetap
13.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Tetap
Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Ubah (Mendesak)
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	Ubah (tidak mendesak)
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tetap
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Tetap
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun	Tetap
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan	Tetap

Tema : Akses Pelayanan Bantuan Hukum		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
	Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi	
7.	Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Tetap
Peraturan Presiden		
1.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial	Tetap
Peraturan Menteri		
1.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan	Tetap
2.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Tetap
3.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	Ubah (mendesak)
Peraturan Mahkamah Agung		
1.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	

Tema : Keimigrasian		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Ubah
2.	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Secara umum untuk pasal terkait TKA Tetap dipertahankan
3.	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Ubah (tidak mendesak)
4.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ubah (tidak mendesak)
5.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Ubah (tidak mendesak)
Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Ubah
Peraturan Presiden		

Tema : Keimigrasian		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
1.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	Ubah (Mendesak)
2.	Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia	belum perlu diubah, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan
3.	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	belum perlu diubah, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan
Peraturan Menteri		
	Peraturan Menkumham Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkumham Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas	Ubah
	Peraturan Menkumham No. 16 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing	Ubah
	Peraturan Menkumham Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia	Tetap
	Peraturan Menkumham Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur	belum perlu diubah, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan
	Peraturan Menkumham Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang	Ubah
	Peraturan Menkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing	Ubah
	Peraturan Menkumham Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian	Tetap dapat dipertahankan, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan
	Peraturan Menkumham Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal	Ubah
	Peraturan Menkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian	Ubah

Tema : Keimigrasian		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
	Peraturan Mendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah	Tetap dapat dipertahankan
	Permenkumham 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian	Ubah

Tema : Pemilihan Umum		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Ubah (sangat mendesak)
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	Ubah
Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum	Ubah (temuan masalah bersifat minor, tidak mendesak)
Peraturan Presiden		
1.	Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekrbtazuat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ubah (temuan masalah bersifat minor, tidak signifikan, tidak mendesak)
2.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Rekomendasi PUU : Ubah (tidak mendesak)
3.	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	Tetap
Peraturan Menteri/Lembaga		
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun	Ubah (tidak mendesak)

Tema : Pemilihan Umum		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
	2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Peraturan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu	Ubah (mendesak)
	Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilu	Tetap
	Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu	Ubah (mendesak)

Tema : Mitigasi Pencemaran Lingkungan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Pembenahan dan sinkronisasi
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Perlu adanya Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlu diubah
Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Perlu Ubah
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Perlu diubah
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Perlu diubah
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Perlu diubah

Tema : Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Belum perlu untuk diubah, namun segera disusun peraturan pelaksanaannya (baik PP, Perpres dan Permen)
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mendesak untuk diubah
3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Mendesak untuk diubah
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Mendesak untuk diubah
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlu diubah
6.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Perlu diubah
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Perlu diubah
8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Mendesak untuk diubah
9.	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara	Perlu diubah
10.	Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Perlu diubah
11.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Perlu diubah
12.	Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Perlu diubah
13.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perlu diubah
14.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Belum perlu diubah namun perlu segera disusun peraturan pelaksanaannya dan diharmonisasikan dengan uu Cipta Kerja
15.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Perlu diubah dan diharmonisasikan dengan UU Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Tema : Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Presiden		
1.	Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekrbtazuat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ubah (temuan masalah bersifat minor, tidak signifikan, tidak mendesak)
2.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Rekomendasi PUU : Ubah (tidak mendesak)
3.	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	Tetap

Tema : Tata Kelola Perkebunan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	UU ini mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2.	UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Ubah UU 23/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3.	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Ubah UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ubah UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5.	UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Ubah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6.	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Ubah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang direkomendasikan untuk diubah.
7.	UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ubah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal direkomendasikan untuk diubah.
8.	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Ubah
9.	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Ubah
10.	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU	Ubah
	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Ubah
	UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	Ubah

Tema : Tata Kelola Perkebunan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Peraturan Pemerintah		
1.	PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	Tetap
2.	PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Ubah
3.	PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman	Ubah
4.	PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan	Ubah
Peraturan Presiden		
1.	Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Tetap
2.	Perpres Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Tetap
Inpres		
1.	Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Tetap
2.	Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Tetap
Peraturan Menteri/Lembaga/Badan		
1.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian	Tetap
2.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	Tetap
3.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun	Tetap
4.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	Tetap
5.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) yang Baik	Tetap
6.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial	Tetap
7.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	Ubah
8.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127 /Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Ubah

Tema : Tata Kelola Perkebunan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
9.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Tetap
10.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO</i>)	Tetap
11.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan	Tetap
12.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Tetap
Peraturan Daerah		
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan	Tetap

Tema : Perlindungan Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Diubah dan mendesak
2.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Diubah tapi tidak mendesak
3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Diubah tapi tidak mendesak
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tetap
6.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diubah tapi tidak mendesak
7.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Diubah tapi tidak mendesak
8.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Tetap
9.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Perlu ada penjelasan tentang pentingnya perlindungan data atau cara perlindungan data terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri.
10.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Tetap
11.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi	Tetap

Tema : Perlindungan Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
12.	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Tetap
13.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Perlu ada pengaturan tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi
14.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Tetap
15.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Perlu menambahkan kata "praktek" sebelum kata monopoli, karena dengan makna sebelumnya dapat diartikan bahwa monopoli merupakan sesuatu yang dilarang, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, monopoli bukanlah hal yang dilarang, yang dilarang oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Praktek Monopoli.
16.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Tetap

Tema : Kepariwisataaan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Perlu diubah
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Tetap
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Perlu diubah
Peraturan Pemerintah		
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025	Perlu Ubah
Peraturan Presiden		
1.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan	Perlu Ubah
2.	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal	Perlu Ubah
Peraturan Menteri		
1.	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	Tetap

Tema : PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Ubah Cukup Mendesak
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Ubah
3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Ubah Cukup Mendesak
4	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi	Ubah
5	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Ubah
Peraturan Pemerintah		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah	Tetap
2	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah	Tetap
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah	Ubah
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Tetap
Peraturan Presiden		
1.	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur.	Perlu diubah bentuk Hukum dengan mengaturnya ada tingkat Undang-Undang
2.	Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juncto Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	Diatur dalam UU bersamaan dengan 3 Perpres yang mengatur terkait KPBU
3.	Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Diatur dalam UU bersamaan dengan 3 Perpres yang mengatur terkait KPBU
4.	Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	Diatur dalam UU bersamaan dengan 3 Perpres yang mengatur terkait KPBU
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Tetap

Tema : PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Peraturan Menteri		
1.	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dana Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dana Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Tetap
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Di Daerah	Tetap
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Ubah
4.	Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	Tetap
5.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170 /PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Tetap
6.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas	Tetap
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	Ubah

Tema : Kependudukan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Ubah dan mendesak
2	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Ubah Cukup Mendesak
3	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Ubah Cukup Mendesak
Peraturan Pemerintah		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan	Ubah dan cukup mendesak

Tema : Kependudukan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga	Ubah tapi tidak mendesak
3	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Ubah dan cukup mendesak
Peraturan Presiden		
1.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	Ubah dan cukup mendesak
2.	Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Ubah tapi tidak mendesak
3.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Ubah tapi tidak mendesak
4.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Ubah dan cukup mendesak
5	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Ubah tapi tidak mendesak
6.	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati	Ubah tapi tidak mendesak
Peraturan Menteri		
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Ubah tapi tidak mendesak
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Ubah tapi tidak mendesak
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak	Ubah tapi tidak mendesak
4.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	Ubah tapi tidak mendesak
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus	tetap
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	tetap
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	Ubah tapi tidak mendesak

Tema : Kependudukan		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ubah tapi tidak mendesak
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Ubah tapi tidak mendesak

Tema : Penyiaran		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Ubah dan mendesak
2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Ubah dan cukup mendesak
3	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Ubah tapi tidak mendesak
Peraturan Pemerintah		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	Ubah tapi tidak mendesak
2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	Ubah tapi tidak mendesak
3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Ubah tapi tidak mendesak
4	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Ubah tapi tidak mendesak
5	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	Ubah tapi tidak mendesak
6	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	Ubah tapi tidak mendesak
7	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Komunitas	tetap
8	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	Ubah tapi tidak mendesak
Peraturan Menteri		
1.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (<i>Free to Air</i>)	Ubah tapi tidak mendesak
2.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	Ubah tapi tidak mendesak
3.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran	Ubah tapi tidak mendesak
4.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	Ubah tapi tidak mendesak

Tema : Penyiaran		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
	Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial	
5.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial	tetap
6.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial	tetap
7.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran	Ubah tapi tidak mendesak
8.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (<i>Free to Air</i>)	Ubah tapi tidak mendesak

Tema : Sistem Jaminan Sosial Nasional		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
Undang-Undang		
1	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Ubah dan cukup mendesak
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Ubah tapi cukup mendesak
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Ubah tapi tidak mendesak
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Ubah dan mendesak
5	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Ubah tapi tidak mendesak
Peraturan Pemerintah		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Ubah tapi tidak mendesak
2	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Ubah tapi tidak mendesak
3	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Ubah tapi tidak mendesak
4	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Yang	Ubah tapi tidak mendesak

Tema : Sistem Jaminan Sosial Nasional		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
	Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015	Ubah tapi tidak mendesak
6	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	Ubah dan mendesak
7	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	Terdapat perbedaan batas usia pensiun diantara sejumlah regulasi, sedangkan program pensiun harus dimaknai sama agar dapat berjalan optimal
8	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	Ubah tapi tidak mendesak
9	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Ubah dan cukup mendesak
10	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Ubah tapi tidak mendesak
Peraturan Presiden		
1	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	Ubah tapi tidak mendesak
2	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	Ubah tapi tidak mendesak
3	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional	Ubah dan cukup mendesak
Peraturan Menteri		
1.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah	Ubah tapi tidak mendesak

Tema : Sistem Jaminan Sosial Nasional		
No.	Judul Peraturan	Rekomendasi
2.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah	Ubah tapi tidak mendesak
3.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah	-
4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	Ubah tapi tidak mendesak
5.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Ubah tapi tidak mendesak
6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan	Ubah tapi tidak mendesak
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/Pmk.02/2018 Tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan	Ubah tapi tidak mendesak
8.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	Ubah tapi tidak mendesak

Dokumen Hukum Terintegrasi Sepanjang Tahun 2020 Dalam Portal JDIHN

No.	Nama Dokumen Hukum	Jumlah
1	Ketetapan MPR	9
2	Undang-Undang	12
3	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	113
4	Peraturan Pemerintah	77
5	Peraturan Presiden	70
6	Keputusan Presiden	3.754
7	Instruksi Presiden	13
8	Peraturan Menteri	9.641
9	Keputusan Menteri	5.310
10	Keputusan Bersama Menteri	4
11	Instruksi Menteri	30
12	Surat Edaran	224
13	Peraturan Eselon 1	50
14	Keputusan Eselon 1	10
15	Peraturan DPD	20
16	Peraturan Komisi Yudisial	1
17	Peraturan Lembaga	69
18	Peraturan Kepala	242
19	Peraturan Badan	405
20	Peraturan Komisi	158
21	Keputusan	2.481
22	Peraturan Daerah Provinsi	658
23	Peraturan Daerah Kabupaten	10.288
24	Peraturan Daerah Kota	3.210
25	Peraturan DPRD Provinsi	29
26	Peraturan DPRD Kabupaten	94
27	Peraturan DPRD Kota	21
28	Peraturan Gubernur	1.654
29	Peraturan Bupati	19.028
30	Peraturan Walikota	6.091
31	Peraturan Desa	849
32	Keputusan Gubernur	545
33	Keputusan Bupati	7.621
34	Keputusan Walikota	493
35	Keputusan DPRD	1.974
36	Instruksi Gubernur	14
37	Instruksi Bupati	21
38	Instruksi Walikota	4
39	Staatsblad	11
40	Buku Hukum	397
41	Naskah Akademik Kemenkumham	8
42	Naskah Akademik	36
43	Penelitian Hukum Dan HAM	155
44	Pengkajian Hukum	32
45	Penulisan Karya Ilmiah	11
46	Kompendium Hukum	3
47	Analisis dan Evaluasi	16
48	Majalah Hukum Nasional	7

No.	Nama Dokumen Hukum	Jumlah
49	Majalah Hukum	12
50	Kliping Majalah Koran	611
51	Jurnal Hukum	14
52	Putusan Mahkamah Konstitusi	3.448
53	Rancangan	39
54	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	14
55	Memorandum Of Understanding	226
56	Perjanjian Kerjasama	2
57	Artikel	122
58	Lokakarya	15
59	Peraturan Rektor	38
60	Pengkajian Kebijakan Hukum dan HAM	10
61	Penelitian Hukum	39
62	Risalah Sidang	105
63	Keputusan Pimpinan DPRD	608
64	Risalah DPRD	31
65	Perjanjian Kerja Sama	22
66	Peraturan Ketua	45
67	Keputusan Rektor	183
68	Keputusan Dekan	974
69	Keputusan Ketua	1
70	Peraturan Eselon I	1
71	Surat Keputusan DPRD Kabupaten	1
72	Keputusan Bersama DPRD Kabupaten	3
73	Surat Keputusan	1
74	Keputusan Eselon II	2
75	Himpunan	80
76	Kesepakatan Bersama Bupati	3
77	Surat Pernyataan Bupati	4
78	Peraturan Dewan	26
79	Keputusan Dewan	5
80	Juklak/Juknis	3
81	Referensi	3
82	Himpunan Peraturan	10
83	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1
84	Statuten	1.139
85	Konvensi	57
86	Statuta	1
87	Protokol	14
88	Hukum Tidak Tertulis	4
89	Kovenan	1
90	Deklarasi	1
91	Agreement	7
92	Treaty	5
93	Peraturan Sekretaris Jenderal	16
	Total	83.910

Data Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota
1.	Ciwidey	Ciwidey	Kab. Bandung
2.	Panyocokan	Ciwidey	Kab. Bandung
3.	Katapang	Katapang	Kab. Bandung
4.	Margahayu	Margahayu	Kab. Bandung
5.	Jelegong	Rancaekek	Kab. Bandung
6.	Sukatani	Ngamprah	Kab. Bandung Barat
7.	Tanimulya	Ngamprah	Kab. Bandung Barat
8.	Purwasari	Dramaga	Kab. Bogor
9.	Sukadamai	Dramaga	Kab. Bogor
10.	Karangpaningal	Purwadadi	Kab. Ciamis
11.	Purwadadi	Purwadadi	Kab. Ciamis
12.	Cihaurkuning	Malangbong	Kab. Garut
13.	Cilampuyang	Malangbong	Kab. Garut
14.	Jati	Bojongpicung	Kab. Cianjur
15.	Cimenteng	Campaka	Kab. Cianjur
16.	Babakan Karet	Cianjur	Kab. Cianjur
17.	Sukamanah	Cibeber	Kab. Cianjur
18.	Puncakbaru	Cidaun	Kab. Cianjur
19.	Padaasih	Cijati	Kab. Cianjur
20.	Sinarbakti	Cijati	Kab. Cianjur
21.	Sindangsari	Ciranjang	Kab. Cianjur
22.	Benjot	Cugenang	Kab. Cianjur
23.	Gekbrong	Gekbrong	Kab. Cianjur
24.	Sukakerta	Kadupandak	Kab. Cianjur
25.	Sukataris	Karangtengah	Kab. Cianjur
26.	Leuwikoja	Mande	Kab. Cianjur
27.	Tanjungsari	Sukaluyu	Kab. Cianjur
28.	Padaluyu	Tangeung	Kab. Cianjur
29.	Pamengkang	Mundu	Kab. Cirebon
30.	Ciperna	Talun	Kab. Cirebon
31.	Wanasaba Lor	Talun	Kab. Cirebon
32.	Kalibaru	Tengah Tani	Kab. Cirebon
33.	Kenanga	Sindang	Kab. Indramayu
34.	Rambatan Wetan	Sindang	Kab. Indramayu
35.	Winantara	Sindang	Kab. Indramayu
36.	Sleman	Sliyeg	Kab. Indramayu
37.	Sleman Lor	Sliyeg	Kab. Indramayu
38.	Cibeber	Sukagumiwang	Kab. Indramayu
39.	Kondangjaya	Karawang Timur	Kab. Karawang
40.	Tegal Sawah	Karawang Timur	Kab. Karawang
41.	Warungbambu	Karawang Timur	Kab. Karawang
42.	Plawad	Karawang Timur	Kab. Karawang
43.	Geresik	Ciawigebang	Kab. Kuningan
44.	Nangka	Kadugede	Kab. Kuningan
45.	Babakanreuma	Sindang Agung	Kab. Kuningan
46.	Tirtawangunan	Sindang Agung	Kab. Kuningan
47.	Bantarujeg	Bantarujeg	Kab. Majalengka

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota
48.	Wadowetan	Bantarujeg	Kab. Majalengka
49.	Cicadas	Jatiwangi	Kab. Majalengka
50.	Cigaleuh	Lemahsugih	Kab. Majalengka
51.	Pageraji	Maja	Kab. Majalengka
52.	Sukadana	Malausma	Kab. Majalengka
53.	Pasirmuncang	Panyangkiran	Kab. Majalengka
54.	Sangkanhirup	Sindang	Kab. Majalengka
55.	Hegarmana	Babakancikao	Kab. Purwakarta
56.	Cilingga	Darangdan	Kab. Purwakarta
57.	Karangpedes	Kiarapedes	Kab. Purwakarta
58.	Bantarsari	Cijambe	Kab. subang
59.	Sukahirup	Cijambe	Kab. subang
60.	Gardusayang	Cisalak	Kab. subang
61.	Margasari	Dauan	Kab. subang
62.	Kaliangsana	Kalijati	Kab. subang
63.	Kalijati Barat	Kalijati	Kab. subang
64.	Cihambulu	Pabuaran	Kab. subang
65.	Pringkasap	Pabuaran	Kab. subang
66.	Margahayu	Pagaden Barat	Kab. subang
67.	Panyingkiran	Purwadadi	Kab. subang
68.	Pasirbungur	Purwadadi	Kab. subang
69.	Dayaeuhkolot	Sagalaherang	Kab. subang
70.	Bojongkeding	Tambakdahan	Kab. subang
71.	Cihaur	Simpenan	Kab. Sukabumi
72.	Kertajaya	Simpenan	Kab. Sukabumi
73.	Loji	Simpenan	Kab. Sukabumi
74.	Sukajaya	Sukabumi	Kab. Sukabumi
75.	Mandalaherang	Cimalaka	Kab. Sumedang
76.	Cibeureum Kulon	Cimalaka	Kab. Sumedang
77.	Licin	Cimalaka	Kab. Sumedang
78.	Mangunarga	Cimanggung	Kab. Sumedang
79.	Cihanjuang	Cimanggung	Kab. Sumedang
80.	Swahdadap	Cimanggung	Kab. Sumedang
81.	Sayang	Jatinangor	Kab. Sumedang
82.	Ciptasari	Pamulihan	Kab. Sumedang
83.	Pasirbiru	Rancakolong	Kab. Sumedang
84.	Ambit	Situraja	Kab. Sumedang
85.	Sukatali	Situraja	Kab. Sumedang
86.	Margamekar	Sumedang Selatan	Kab. Sumedang
87.	Kebon Jati	Sumedang Utara	Kab. Sumedang
88.	Mulyasari	Sumedang Utara	Kab. Sumedang
89.	Sinarmulya	Sumedang Utara	Kab. Sumedang
90.	Cinanjung	Tanjungsari	Kab. Sumedang
91.	Raharja	Tanjungsari	Kab. Sumedang
92.	Tanjungsari	Tanjungsari	Kab. Sumedang
93.	Bugel	Tomo	Kab. Sumedang
94.	Pagersari	Pagaregeung	Kab. Tasikmalaya
95.	Cibungur	Parungpenteng	Kab. Tasikmalaya
96.	Sukamenak	Sukaresik	Kab. Tasikmalaya

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota
97.	Cigadung	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
98.	Kebon	Kiaracondong	Kota Bandung
99.	Derwati	Rancasari	Kota Bandung
100.	Isola	Sukasari	Kota Bandung
101.	Jatimulya	Cilodong	Kota Depok
102.	Kalibaru	Cilodong	Kota Depok
103.	Cipayung	Cipayung	Kota Depok
104.	Cipayung Jaya	Cipayung	Kota Depok
105.	Pondok Jaya	Cipayung	Kota Depok
106.	Grogol	Limo	Kota Depok
107.	Pancoran Mas	Pancoran Mas	Kota Depok
108.	Bedahan	Sawangan	Kota Depok
109.	Cinangka	Sawangan	Kota Depok
110.	Pasir Putih	Sawangan	Kota Depok
111.	Tirtajaya	Sukmajaya	Kota Depok
112.	Cilembang	Cihideung	Kota Tasikmalaya
113.	Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
114.	Karikil	Mangkubumi	Kota Tasikmalaya
115.	Sumelap	Taman Sari	Kota Tasikmalaya

Daftar anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi Tahun 2020

No	Nama Unit/Anggota Tertintegrasi	Tanggal
JANUARI		
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	20.01.2020
2	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	31.01.2020
3	Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Lampung	31.01.2020
FEBRUARI		
4	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	07.02.2020
5	Pemerintah Kabupaten Bungo	07.02.2020
6	Pemerintah Kota Magelang	21.02.2020
7	Pemerintah Kabupaten Majalengka	25.02.2020
MARET		
8	Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	02.03.2020
9	Pemerintah Kabupaten Simalungun	04.03.2020
10	Pemerintah Kota Mataram	04.03.2020
11	Pemerintah Provinsi Papua Barat	04.03.2020
12	Pemerintah Kabupaten Lamandau	19.03.2020
13	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	19.03.2020
14	Pemerintah Kota Sungai Penuh	20.03.2020
15	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	23.03.2020
16	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	23.03.2020
17	Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Yogyakarta	23.03.2020
18	Pemerintah Kota Jambi	23.03.2020
19	Pemerintah Kabupaten Seruyan	24.03.2020
20	Pemerintah Kabupaten Wajo	24.03.2020
21	Pemerintah Kota Pariaman	31.03.2020
22	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	31.03.2020
APRIL		
23	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	01.04.2020
24	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	06.04.2020
25	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu	08.04.2020
26	Pemerintah Kabupaten Sambas	13.04.2020
27	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	16.04.2020
28	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	17.04.2020
29	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	21.04.2020
30	Sekretariat DPRD Kabupaten Bima	22.04.2020
31	Pemerintah Kabupaten Banjar	23.04.2020
32	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	28.04.2020
33	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	28.04.2020
MEI		
34	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	08.05.2020
35	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	27.05.2020

36	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	27.05.2020
37	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28.05.2020
38	Pemerintah Kabupaten Karawang	29.05.2020
39	Pemerintah Kota Surabaya	29.05.2020
40	Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan	29.05.2020
41	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	29.05.2020
JUNI		
42	Pemerintah Provinsi Banten	04.06.2020
43	Pemerintah Kota Bukittinggi	04.06.2020
44	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	05.06.2020
45	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	08.06.2020
46	Pemerintah Kabupaten Indramayu	09.06.2020
47	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	15.06.2020
48	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	16.06.2020
49	Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur	17.06.2020
50	Pemerintah Kabupaten Nunukan	22.06.2020
51	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	24.06.2020
52	Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	30.06.2020
JULI		
53	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	01.07.2020
54	Pemerintah Kabupaten Takalar	01.07.2020
55	Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur	02.07.2020
56	Sekretariat DPRD Kota Batam	06.07.2020
57	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	06.07.2020
58	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	06.07.2020
59	Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya	07.07.2020
60	Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara	09.07.2020
61	Pemerintah Kabupaten Natuna	09.07.2020
62	Pemerintah Kota Palangkaraya	14.07.2020
63	Pemerintah Kabupaten Ciamis	16.07.2020
64	Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba	17.07.2020
65	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	17.07.2020
66	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	21.07.2020
67	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	21.07.2020
68	Pemerintah Kabupaten Kolaka	23.07.2020
69	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	23.07.2020
70	Inspektorat Jenderal Kemenkumham	28.07.2020
71	Sekretariat DPRD Kota Metro	28.07.2020
72	Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	28.07.2020
73	Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka	28.07.2020
74	Pemerintah Kabupaten Mimika	28.07.2020
75	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	29.07.2020
76	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	30.07.2020
AGUSTUS		

77	STIHTB Palangkaraya	03.08.2020
78	Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana	04.08.2020
79	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	04.08.2020
80	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	05.08.2020
81	Kementerian Kesehatan	06.08.2020
82	Pemerintah Kabupaten Bima	06.08.2020
83	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	06.08.2020
84	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	07.08.2020
85	Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar	10.08.2020
86	Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung	10.08.2020
87	Pemerintah Kota Banjar	11.08.2020
88	Pemerintah Kabupaten Maros	12.08.2020
89	Komisi Aparatur Sipil Negara	12.08.2020
90	Pemerintah Provinsi Gorontalo	12.08.2020
91	Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	13.08.2020
92	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	13.08.2020
93	Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli	13.08.2020
94	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	13.08.2020
95	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	13.08.2020
96	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	13.08.2020
97	Universitas Muhammadiyah Metro	13.08.2020
98	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	13.08.2020
99	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	14.08.2020
100	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	14.08.2020
101	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	14.08.2020
102	Universitas Lampung (UNILA)	14.08.2020
103	Pemerintah Kabupaten Barru	15.08.2020
104	Sekretariat DPRD Kota Dumai	18.08.2020
105	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	19.08.2020
106	Sekretariat Dewan Kabupaten Lingga	21.08.2020
107	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	22.08.2020
108	Pemerintah Kota Bima	24.08.2020
109	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	25.08.2020
110	Pemerintah Kota Kediri	25.08.2020
111	Pemerintah Kabupaten Sampang	26.08.2020
112	Pemerintah Kota Pasuruan	26.08.2020
113	Pemerintah Kota Probolinggo	26.08.2020
114	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	27.08.2020
115	Pemerintah Kabupaten Kediri	27.08.2020
116	Pemerintah Kabupaten Pacitan	27.08.2020
117	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya	27.08.2020
118	Pemerintah Kabupaten Magetan	27.08.2020
119	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	27.08.2020
120	Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran	27.08.2020

121	Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali	28.08.2020
122	Badan Intelijen Negara	28.08.2020
123	Pemerintah Kabupaten Malang	28.08.2020
124	Pemerintah Kabupaten Lamongan	28.08.2020
125	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	28.08.2020
SEPTEMBER		
126	Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru	01.09.2020
127	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	01.09.2020
128	Sekretariat DPRD Kabupaten Pati	01.09.2020
129	Pemerintah Kota Kendari	01.09.2020
130	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat	01.09.2020
131	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	01.09.2020
132	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis	02.09.2020
133	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM	03.09.2020
134	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM	03.09.2020
135	Pemerintah Kota Gorontalo	04.09.2020
136	Pemerintah Kabupaten Mamasa	04.09.2020
137	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	04.09.2020
138	Pemerintah Kota Batu	04.09.2020
139	Pemerintah Kota Blitar	04.09.2020
140	Pemerintah Kabupaten Situbondo	04.09.2020
141	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	04.09.2020
142	Pemerintah Kota Prabumulih	04.09.2020
143	Pemerintah Kabupaten Madiun	04.09.2020
144	Pemerintah Kabupaten Sumenep	04.09.2020
145	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	07.09.2020
146	Pemerintah Kota Madiun	08.09.2020
147	Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk	08.09.2020
148	Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso	08.09.2020
149	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	09.09.2020
150	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	09.09.2020
151	Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	10.09.2020
152	Kementerian Dalam Negeri	11.09.2020
153	Pemerintah Kabupaten Jember	12.09.2020
154	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur	14.09.2020
155	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi	14.09.2020
156	Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan	14.09.2020
157	Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan	14.09.2020
158	Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan	14.09.2020
159	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	14.09.2020
160	Pemerintah Kabupaten Blitar	14.09.2020
161	Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang	14.09.2020
162	Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo	14.09.2020

163	Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo	14.09.2020
164	Sekretariat DPRD Kota Batu	14.09.2020
165	Sekretariat DPRD Kota Madiun	14.09.2020
166	Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan	14.09.2020
167	Sekretariat DPRD Kabupaten Malang	15.09.2020
168	Sekretariat DPRD Kota Malang	15.09.2020
169	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	15.09.2020
170	Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro	16.09.2020
171	Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	16.09.2020
172	Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun	16.09.2020
173	Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo	16.09.2020
174	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung	16.09.2020
175	Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	16.09.2020
176	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	16.09.2020
177	Sekretariat DPRD Kota Surabaya	16.09.2020
178	Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi	16.09.2020
179	Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto	16.09.2020
180	Pemerintah Kabupaten Ngawi	16.09.2020
181	Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan	16.09.2020
182	Sekretariat DPRD Kota Blitar	16.09.2020
183	Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene	16.09.2020
184	Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	16.09.2020
185	Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	17.09.2020
186	Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri	17.09.2020
187	Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo	17.09.2020
188	Sekretariat DPRD Kota Mojokerto	17.09.2020
189	Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek	17.09.2020
190	Direktorat Jenderal Imigrasi	17.09.2020
191	Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar	17.09.2020
192	Sekretariat DPRD Kota Kediri	17.09.2020
193	Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban	17.09.2020
194	Sekretariat DPRD Kabupaten Jember	17.09.2020
195	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep	17.09.2020
196	Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan	17.09.2020
197	Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang	17.09.2020
198	Sekretariat Jenderal Kemenkumham	22.09.2020
199	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	22.09.2020
200	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	23.09.2020
201	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	23.09.2020
202	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	25.09.2020
203	DPRD Kabupaten Lampung Barat	25.09.2020
204	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	28.09.2020
205	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	28.09.2020
206	Kabupaten Bulukumba	29.09.2020

207	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	29.09.2020
208	Universitas Bandar Lampung (UBL)	30.09.2020
OKTOBER		
209	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	01.10.2020
210	Kabupaten Kepulauan Aru	05.10.2020
211	Kota Baubau	05.10.2020
212	DPRD Kabupaten Wonosobo	05.10.2020
213	DPRD Kota Bekasi	07.10.2020
214	DPRD Kota Tasikmalaya	08.10.2020
215	Kabupaten Sikka, Provinsi NTT	13.10.2020
216	Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara	14.10.2020
217	Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT	14.10.2020
218	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	15.10.2020
219	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan	15.10.2020
220	DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	15.10.2020
221	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15.10.2020
222	DPRD Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	16.10.2020
223	Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu	16.10.2020
224	DPRD Provinsi Riau	16.10.2020
225	Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat	21.10.2020
226	Kota Kupang	22.10.2020
227	DPRD Kabupaten Pringsewu	22.10.2020
228	Kota Balikpapan	23.10.2020
229	DPRD Kota Cirebon	23.10.2020
230	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	26.10.2020
231	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	26.10.2020
232	Kabupaten Aceh Barat	26.10.2020
233	Kabupaten Aceh Selatan	26.10.2020
234	Kabupaten Aceh Singkil	26.10.2020
235	DPRD Kabupaten Way Kanan	27.10.2020
NOVEMBER		
236	Kabupaten Paser	02.11.2020
237	DPRD Kabupaten Cilacap	04.11.2020
238	DPRD Kota Pangkalpinang	06.11.2020
239	Kota Subulussalam	06.11.2020
240	Kota Ternate	11.11.2020
241	Kabupaten Majene	12.11.2020
242	Kabupaten Kapuas	13.11.2020
243	LPNK Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS)	13.11.2020
244	Kabupaten Minahasa	16.11.2020
245	Kabupaten Kepulauan Selayar	16.11.2020
246	Setwan DPRD Kab. Pesisir Barat	16.11.2020
247	Kabupaten Sarolangun	17.11.2020
248	Kota Yogyakarta	17.11.2020

249	Kab. Boalemo Prov. Gorontalo	23.11.2020
250	DPRD Kabupaten Pematang	27.11.2020
251	Kabupaten Banyuasin	30.11.2020
DESEMBER		
252	Setwan DPRD Kab. Kepulauan Meranti	14.12.2020
253	Kota Pagar Alam	15.12.2020
254	Komnas Hak Asasi Manusia	17.12.2020
255	Kota Sorong	21.12.2020

**REALISASI ANGGARAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.604.934.000	2.318.295.145	89,00
951	Layanan Internal (Overhead)	4.553.083.000	4.464.111.450	98,05
994	Layanan Perkantoran	26.441.920.000	25.619.098.920	96,89
	Jumlah Program Dukungan Manajemen	39.634.524.000	32.401.505.515	96,43
II	Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional			
1610.001	Anggota JDIH yang terintegrasi	643.389.000	632.383.442	98,29
1610.002	Dokumen Hukum Nasional	492.568.000	484.929.912	98,45
	Sub Jumlah	1.135.957.000	1.117.313.354	98,36
III	Analisis dan Evaluasi Hukum			
1610.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	1.121.131.000	1.091.269.273	97,34
1610.002	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	121.510.000	120.901.034	99,50
1610.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	288.179.000	276.921.300	96,06
	Sub Jumlah	1.530.820.000	1.489.091.607	97,27
IV	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum			
1612.001	Desa Sadar Hukum	473.680.000	468.316.093	98,87
1612.002	Layanan Penyuluhan Hukum	222.495.000	221.088.778	99,37
1612.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di seluruh Wilayah	409.575.000	402.863.511	98,36
1612.004	Penyuluh Hukum Nasional	716.617.000	677.865.825	94,59
	Sub Jumlah	1.822.367.000	1.770.134.207	97,13
V	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional			
1613.001	Dokumen Program Legislasi	633.032.000	608.559.086	96,13
1613.002	Naskah Akademik RUU	333.999.000	331.117.981	99,14
1613.003	Penyelarasan Naskah Akademik	428.412.000	427.174.357	99,71
1613.004	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	150.000.000	148.933.004	99,29
	Sub Jumlah	1.545.443.000	1.515.784.428	98,08
	Jumlah	6.034.587.000	5.892.323.596	97,71
	Total Badan Pembinaan Hukum Nasional	39.634.524.000	38.293.829.111	96,62

2020

LAPORAN KINERJA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

